

**MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA PENETAPAN  
PEMERINTAH MENURUT IBNU TAIMIYAH  
(Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul  
Kabupaten Dairi)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**GANDA HIDAYAH SIMBOLON**  
NIM. 24.14.4.017



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1440 H**

**MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA PENETAPAN  
PEMERINTAH MENURUT IBNU TAIMIYAH  
(Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul  
Kabupaten Dairi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S-1) Pada Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**GANDA HIDAYAH SIMBOLON**

**NIM. 24.14.4.017**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1440 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GANDA HIDAYAH SIMBOLON**  
NIM : 24.14.4.017  
Jurusan : Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Islam  
Fakultas : Syari`ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA  
PENETAPAN PEMERINTAH MENURUT IBNU  
TAIMIYAH (Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan  
Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil buah pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Juli 2019

Penulis,

**GANDA HIDAYA SIMBOLON**

**NIM. 24.14.4.017**

**MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA PENETAPAN  
PEMERINTAH MENURUT IBNU TAIMIYAH  
(Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul  
Kabupaten Dairi)**

Oleh:

**GANDA HIDAYAH SIMBOLON**

**NIM. 24.14.40.17**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.HI., MH

NIP. 197730612 200003 1 002

Cahaya Permata, S.HI., MH

NIP. 19861227 201503 2 002

MENGETAHUI:

KETUA JURUSAN MU`AMALAH

Fatimah Zahara, S.Ag., MA.

NIP. 19730208 199002 2 001

## IKHTISAR

Hasil penelitian tentang judul **MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA PENETAPAN PEMERINTAH MENURUT IBNU TAIMIYAH (Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi)**. Beras adalah salah satu komoditi pokok dan primer bagi masyarakat, untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, tidak boleh adanya kecurangan dan harga yang tinggi agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya itu. Di Pasar Sumbul, harga beras cukup tinggi, dan bervariasi, tidak ada patokan khusus. Setiap penjual bebas menentukan harga beras di pasar tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep penetapan harga oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga beras di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, dan hukum menjual beras tidak sesuai dengan harga penetapan pemerintah di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi menurut Ibnu Taimiyah. Melalui pendekatan konseptual/ normatif dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, penulis merefleksikannya dengan yang terjadi di lapangan/ *sociological approach*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi buku, serta dokumen. Setiap data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penentuan harga bahan pokok menurut Ibnu Taimiyah adalah wajib, dengan syarat kenaikan harga yang terjadi di pasar diakibatkan adanya tindakan kecurangan dari pelaku penimbunan misalnya, tetapi haram hukumnya kalau kenaikan itu berdasarkan kondisi normal yang seyogyanya menjadi proses perdagangan di pasar. Penentuan harga beras yang terjadi di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kelurahan Sumbul Kabupaten Dairi ditetapkan secara bebas oleh penjual, dan tidak terdapatnya harga pasti, masing-masing penjual mempunyai harga yang berbeda-beda. Perbandingannya harga hingga Rp. 5.000,- hingga lebih. Hukum menjual beras tidak sesuai dengan harga penetapan pemerintah menurut Ibnu Taimiyah adalah haram, apabila terdapat pembangkangan, pihak pemerintah wajib memaksa penjual untuk menjual barang dagangannya dengan harga pasaran/ *qimah al-mitsil*, seandainya tidak digubris, maka penjual tidak diperkenankan untuk berjualan di pasar tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Tahmid* dan syukur kepada Allah swt, dengan rahmat dan taufik-Nya yang Maha Besar kepada penulis, semoga segala nikmat yang tak terukur dan tak terhitung itu bisa penulis manfaatkan untuk beribadah kepada-Nya, dan menjadi hambanya yang bertakwa. Shalawat berlimpah salam, kepada junjungan alam, Nabi Muhammad *shallallahu `alaihi wa sallam*, sahabat-sahabatnya, *tabi`in, tabi` tabi`in*, dan orang-orang shaleh yang mendapati pentunjuk. Semoga kita semuanya mendapatkan syafatnya di akhirat kelak, amin.

Skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan, kecuali atas adanya dukungan dan bantuan, serta doa yang luar biasa. Oleh sebab itu, pantas sekali rasanya, untuk menyebut dan mencantumkan nama-nama mereka, sebagai bentuk hormat dan terima kasih penulis. Ucapan terima kasih yang tulus, penulis ucapkan kepada mereka, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN-SU Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU.
3. Ibu Fatimah Zahara, S.Ag., MA, selaku Kepala Jurusan Mu`malah/ Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU.
4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn., selaku Sekretaris Jurusan Mu`malah/ Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU.
5. Bapak Dr. H. M. Jamil, MA., selaku Pembimbing Akademik.

6. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.H.I., MH, selaku Pembimbing I. Telah sudi menjadi pembimbing penulis, dan telah banyak memberikan arahan, kritik dan saran, agar skripsi ini layak untuk disidang *munaqasyahkan*. Semoga Allah swt membalas segala kebaikan, dimudahkan rezeki, dan sehat, serta dalam lindungan Allah swt.
7. Ibu Cahaya Permata, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II. Telah banyak memberikan bantuan, ilmu, kritik dan saran, dan mau bersabar atas segala kekurangan penulis. Semoga Allah swt membalasnya dengan kebaikan dan kesehatan dan umur yang panjang, dan dalam lindungan Allah swt selalu.
8. Ayahanda Tawafi Simbolon dan Ibunda Riama br. Sinaga binti Togama Sinaga (almarhumah), meninggalkan kami untuk selama-lamanya di dunia, tepatnya pada tanggal 12 November 2018. Teruntuk ayahanda, semoga dipanjangkan umur, sehat dan murah rezeki, dan semoga Allah swt memberikan kami anak-anakmu untuk berbakti kepadamu. Ayahanda dan ibunda, telah kutanamkan dalam kalbu rasa cinta, telah terpatri dalam pikiran akan nasehat, dan terlalu dalam rasa cinta dan rindu ku teruntuk kalian berdua. Ibunda, semoga tenanglah jiwa dan ruh mu di alam barzakh. Doa akan senantiasa ku dengungkan ke haribaan alam, kepada Sang Maha Pendengar, dalam setiap selesai shalat, dalam heningku, semoga tempat terbaik diberikan-Nya untukmu, wahai ibunda. Belum sempat tuk banyak berbuat, belum lama rasanya tuk mengabdikan dan berbakti, semoga lantunan dan bait-bait doa ananda, disampaikan oleh Allah swt. Tenanglah di sana ibunda, kami merindukanmu. Ingin tuk

menyampaikan salam, dan sekedar berbincang walau agak sebentar, ananda ingin sampaikan kepadamu ibunda, perjuangan ananda dalam menyelesaikan studi, telah berakhir. Doamu selama ini agar ananda cepat tamat, akhirnya ditunaikan oleh Allah swt, walau tak bisa bersua lagi, semoga keluarga kita kelak, berjumpa di surga-Nya. Amin, ya Allah.

9. Kakakanda Linda Rosa Lina Simbolon, S.E.I., dan adinda penulis Izahatul Hasanah Simbolon, Suharti Ningsih Simbolon, Ja`far Al Farobi Simbolon, Suman Al Farisi Simbolon. Marilah bersama kita untuk menggapai cita-cita, dan berbakti kepada kepada ayahanda yang masih di sisi kita, dan senantiasa mendoakan ibunda yang kita cintai bersama.
10. Mu`allim Riswan Gaja, S.Ag., S.Pd.I, MM., Ustaz M. Abduh, S.H.I., Pak Hermansyah, S.E, M.A. Mereka telah banyak membantu penulis dalam meminjamkan buku-buku, dan juga referensi berbahasa Arab, baik dalam bentuk buku dan juga digital, sehingga memudahkan penulis dalam mencari sumber-sumber untuk kelengkapan skripsi ini. mereka senantiasa memberikan saran dan kritik, tenaga. Semoga Allah swt memberikan balasan berlipat ganda kepada mereka.
11. Ukhti Sahnida Siregar, S.Pd yang selalau *mensupport*. Teman-teman, M. Ilhamdi Sitorus, Irvan Tarigan, S.Agb., Aran Sufajar, S.Pd., Isfan Noer, dan semua teman-teman seperjuangan.
12. Keluarga Besar KKN 72, Desa Beringin Karang Anyer.
13. Keluarga Besar Kos Jl. Durung No. 56 D.
14. Keluarga Besar IKAMDA (Ikatan Alumni Ma`had Dairi).



15. Keluarga Besar IMMUDA (Ikatan Mahasiswa Muslim Dairi & Pakpak Barat).

16. Nara sumber, Bapak Burhan Sagala, selaku Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, Ibu Ernawati Lingga, Ibu Hikmah Pasaribu, Ibu Rika Saut, Bapak Hendri Girsak, Bapak Robi Lingga, Ibu Domina Br. Monjorang, Ibu Fitri Munthe, Ibu Ratna Sitanggang, Bapak Jarin Sigiro.

Masih banyak lagi orang-orang yang telah berjasa dalam menyelesaikan setiap masalah penulis, dan turut membantu serta bersedangsih kepada penyelesaian skripsi ini. Semoga nama-nama yang telah tercantum di atas, kebaikan mereka dibalas oleh Allah swt, serta senantiasa mendapatkan naungan rahmat, dan *maghfirah* dari-Nya. Amin ya rabbal `alamin.

Salam hormat penulis;  
Medan, 19 Juli 2019

**GANDA HIDAYAH SIMBOLON**  
Nim. 24.144.017

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 th. 1987**  
**Nomor: 0543Bju/ 1987**

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	i	je
ح	a		a (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syim	sy	es dan ve
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	Za		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	amzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	
SURAT PERSETUJUAN .....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Hipotesa.....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	22

<b>BAB II LANDASAN TEORI, KONSEP HARGA BAHAN POKOK</b>	
<b>MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN KEBIJAKAN PENETAPAN</b>	
<b>HARGA BAHAN POKOK MENURUT PEMERINTAH.....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Harga Bahan Pokok Menurut Ibnu Taimiyah .....	23
B. Kebijakan Penetapan Harga Bahan Pokok Menurut	
Pemerintah.....	32
<b>BAB III PROFIL PASAR SUMBUL DAN PROFIL KELURAHAN</b>	
<b>PEGAGAN JULU 1 KECAMATAN SUMBUL</b>	
<b>KABUPATEN DAIRI SERTA PENETAPAN HARGA</b>	
<b>BERAS DI PASAR SUMBUL.....</b>	<b>38</b>
A. Profil Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan	
Sumbul Kabupaten Dairi.....	38
B. Profil Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul	
Kabupaten Dairi .....	40
C. Penetapan Harga Beras di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan	
Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>

A. Hukum Menjual Beras Tidak Sesuai dengan Harga Penetapan Pemerintah Menurut Ibnu Taimiyah.....	59
B. Analisis Penulis.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
▪ Daftar Pertanyaan Wawancara	
▪ Foto Nara Sumber	
▪ Foto Profil Kelurahan Pagagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi	
▪ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penetapan harga komoditi oleh pemerintah, adalah suatu keperluan yang mendesak. Penentuan harga bahan pokok tertentu, agar kemashlahatan masyarakat bisa terjamin, peran dari *umara' / wali al-amr* dalam hal ini pemerintah, benar-benar bisa dirasakan oleh rakyatnya.

Realitas dalam dunia pemasaran/ komoditi bisnis, dibutuhkan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal dalam perkara ini. Herdiana menjelaskan, “dalam Islam pengawasan terbagi kepada dua macam, yakni pengawasan diri sendiri, dan pengawasan dari pihak luar”.<sup>1</sup> Dua pengawasan tadi, pengawasan dari pihak luarlah yang terpenting. Kecenderungan manusia untuk mendapatkan keuntungan semata, tentu segala cara dilakukan, termasuk melakukan tindakan kecurangan, dalam hal ini menaikkan harga di luar batas kewajaran, berakibat tindakan penzhaliman kepada orang lain.

---

<sup>1</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, h. 135.

Menentukan harga dengan melebihi harga biasa ini sifatnya terbuka, yakni penjual sendiri mengetahui harga yang ditawarkan oleh penjual, hanya saja penawaran yang diberikan sangat menyusahkan pembeli, karena selisih harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga normal. Ketentuan harga telah ditetapkan oleh *ulil amri*/ pemerintah setempat, bertujuan untuk menjaga terpenuhinya bahan pokok oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Lumrah terjadi dalam jual beli, ada tawar menawar, harga barang terlalu tinggi, pembeli merasa serba salah melakukan permintaan untuk mengurangi harga barang yang dibutuhkan itu. Menjadi permasalahannya adalah barang tersebut adalah kebutuhan yang sifatnya primer dan penting untuk keberlangsungan hidup, seperti beras yang merupakan makanan pokok bagi rakyat Indonesia, begitu juga di Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Di Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, terdapat salah satu pasar yang dikenal dengan Pasar Sumbul. Pasar ini termasuk pasar yang cukup besar, uniknya pasar ini hanya dibuka pada hari selasa, dimulai dari senin sore, hingga selasa malam, dikarenakan



pasar ini hanya buka pada hari tertentu saja, pada hari tertentu sangat ramai pengunjung, berbeda dengan hari biasanya. Hari biasanya, penjual cenderung melakukan jual beli di luar dari pasar tersebut, didapati beberapa penjual tempat menggelar bahan dagangannya di luar-luar waktu ramai. Ini dikarenakan, sebagian mereka menetap di tempat tersebut, sebagian besar lainnya sifatnya berpindah-pindah.<sup>2</sup>

Pasar Sumbul seperti pasar-pasar yang terdapat di daerah lainnya yang ada di Kota Medan, adanya ketetapan dari pemerintah setempat untuk menentukan harga komoditi tertentu, sehingga menjadi antisipasi dari melonjaknya harga yang dilakukan oleh penjual, demi meraih keuntungan yang tinggi.<sup>3</sup>

Salah satu komoditi dan barang dagangan yang terdapat di pasar tersebut adalah bahan-bahan pokok dan keperluan masyarakat setempat, di antaranya harga beras eceran. Sesuai informasi yang didapatkan, di pasar tersebut kerap terjadi kenaikan harga yang tidak lazim dan dilakukan sepihak oleh penjual, dengan menaikkan harga barang pokok di atas

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Girsak, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

ambang batas yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat.<sup>4</sup> Selisih harga yang ditentukan oleh penjual dari harga normal yang ditentukan oleh pemerintah hingga berkisar Rp. 5.000/ kg nya, tentu ini menjadi kegelisahan sendiri bagi pembeli.<sup>5</sup>

Seseorang yang menaikkan harga komoditi barang pokok, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, barang dagangannya itu merupakan keperluan hajat hidup orang banyak, maka ia tidak diperbolehkan untuk berjualan, perbuatannya itu adalah suatu penzaliman bagi manusia/ orang-orang yang hendak membeli, atau yang membutuhkan.<sup>6</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat, sebagai berikut:

إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ سَعْرٌ غَالِبٌ فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَبِيعَ بِأَعْلَىٰ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ  
يَمْنَعُ مِنْهُ فِي السُّوقِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ . وَهَلْ يَمْنَعُ النُّقْصَانَ ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ  
لَهُمْ . وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَحْمَدَ : كَأَبِي حَفْصِ الْعَكْبَرِيِّ . وَالْقَاضِي

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Ernawati Lingga, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Hikmah Pasaribu, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Kamis, 11 Juli 2019.

<sup>6</sup> Taqi ad-Din Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim ibn Taimiyah al-Harani al-Hanbali, *Majmu` al-Fatawa*, Juz XXVIII (Bairut: Dar al-Wafa', 2005), cet. 3, h. 75.

أَبِي يَعْلَى ؛ وَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ وَأَبِي الْخَطَّابِ ؛ وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمْ :  
فَمَنْعُوا مِنْ ذَلِكَ.<sup>٧</sup>

Artinya: Apabila telah didapati suatu ketentuan harga yang telah ditetapkan, ada yang menginginkan untuk menjual komoditinya dengan harga lebih tinggi dari yang telah ditentukan itu, menurut Imam Malik, ia dicegah untuk memasarkan dagangannya ke pasar. Mengenai pelanggaran itu, apakah ada ketentuan hukuman lainnya?. Terhadap masalah ini, baik Imam asy-Syafi'i, pendapat ulama Hanbali, seperti Abu Hafsh al-'Akbari, dan Qadhi Abu Ya'la, dan Syarif Abu Ja'far, Abu al-Khaththab, Ibnu 'Aqil dan selain mereka berpendapat, melarang tindakan itu.

Sebagian pendapat yang mendalilkan sabda Rasulullah saw ketika dimintakan oleh sahabatnya untuk menentukan harga pasaran (bahan pokok), tetapi Rasulullah saw menolak untuk melakukan penentuan harga bahan pokok tersebut.<sup>8</sup> Menurut Ibnu Taimiyah, dalil hadis tersebut haruslah ditilik kembali dalam konteks umum, bukan konteks khusus.

Ibnu Taimiyah tidak menolak hadis itu, hadis itu mestinya diterapkan ketika kondisi ekonomi yang stabil dan normal. Kenaikan harga atau menurunnya harga di pasaran disebabkan kondisi yang lazim, tidak ada penimbunan, tidak terdapat kecurangan dalam jual beli, serta menaikkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 90.

<sup>8</sup> Ibn Majah Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Juz VI (Bairut: Dar al-'Ilmiyah, t.th), h. 443, hadis ke-2.191.

harga secara drastis, tetapi kalau kondisinya berbeda, terjadi ketidakwajaran dalam penawaran harga yang ditentukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi, sedangkan barang dagangan itu dibutuhkan oleh orang banyak sebagai kebutuhan pokok dan primer, kondisi seperti ini diperlukan suatu kekuatan dari pihak pemerintah/ *ulil amiri* untuk memaksa penjual agar menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar/ umum, dengan istilah *qimah al-mitsl*, yakni harga yang biasa terdapat di masyarakat, merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan kontrol pihak pemerintah. Ibnu Taimiyah menuliskan:

فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.<sup>9</sup>

Artinya : Maka di sini wajib atas mereka untuk menjual harga dagangan itu dengan harga wajar/ *qimah al-mitsl*, dan tidak boleh mereka para penimbun itu yang menentukan harga, melainkan harus dengan harga yang sewajarnya, itu diwajibkan atas mereka, sesuai dengan yang diperintahkan Allah swt.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul: **“MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA PENETAPAN PEMERINTAH MENURUT IBNU**

---

<sup>9</sup> Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyah* (Mesir: Al-Maktabah al-`Ilmiyah, t.th), h. 18.

**TAIMIYAH (Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana penetapan harga beras di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana hukum menjual beras tidak sesuai dengan harga penetapan pemerintah di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi menurut Ibnu Taimiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah.
2. Untuk mengetahui penetapan harga beras di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
3. Untuk mengetahui hukum menjual beras tidak sesuai dengan harga penetapan pemerintah di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi menurut Ibnu Taimiyah.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, kaitannya dengan hukum menjual beras tidak sesuai harga penetapan pemerintah menurut Ibnu Taimiyah. Komoditi yang dijual adalah merupakan bahan primer bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi berupa beras.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dalam rangka syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, jurusan Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah.
- b. Sebagai ilmu pengetahuan bagi penjual dan pembeli di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
- c. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan tentang *tas`ir*/ penetapan harga oleh pemerintah.
- d. Bahan rujukan bagi peneliti sesudahnya.

## E. Kerangka Konseptual

Jaib dalam kitabnya *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istihlan* menjelaskan tentang jual beli, yakni: “Jual beli secara bahasa berarti memberikan barang dengan diganti uang/ *tsaman*. Secara syara` berarti, suatu pertukaran sesuatu untuk mendapatkan yang diinginkan”.<sup>10</sup> Al-Jaziri menerangkan tentang jual beli, yakni: “suatu akad yang merupakan pertukaran atau perpindahan suatu harta seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu”.<sup>11</sup> As-Sayid Sabiq berpendapat, “dalam suatu jual beli mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi secara benar, baik itu orang yang berakad, harga, barang yang diakadkan”,<sup>12</sup> yang dikenal dengan rukun jual beli.

Pandangan Islam, dalam bermu`amalah antara manusia, dalam bentuk hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa dan jual beli, bukan saja dipandang dalam dimensi aktivitas keseharian manusia dalam

---

<sup>10</sup> Sa`di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istihlan* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), h. 44.

<sup>11</sup> `Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala mazahaib al-`Arba`ah; Qism al-Mu`amalah* (Turki: Dar ad-Dakwah, 1986), h. 152-153.

<sup>12</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Juz XI (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h. 228.

mempertahankan kehidupannya, lebih dari itu, setiap pembeli dan penjual mendapatkan pahala apabila ia meniatkan aktivitasnya untuk mengabdikan kepada Allah swt, dan membantu sesama manusia.

Kaidah fikih memberikan ulasan, seseorang yang hanya mandi tidak diniatkan ibadah, berbeda di sisi Allah swt apabila seseorang itu melakukannya dengan niat mandi sunah misalnya, begitu juga seseorang yang menyiramkan air ke tubuhnya, hanya untuk mendinginkan tubuhnya, tidak bernilai, kecuali ia melakukan itu sembari berniat dan berwudhu. Sama halnya dengan bermu`amalah, tentu aktivitas seorang mukmin akan lebih tinggi, karena selain bernuansa kemanusiaan, bernilai ibadah, dan dibalas dengan pahala oleh Allah swt, kalau ia berniat untuk ibadah sebelum melakukan rutinitas itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah saw berkaitan dengan niat, sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ



كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ  
إِلَيْهِ.

Artinya: Dari `Umar ibn Khaththab ketika ia berkhotbah di hadapan manusia, maka ia (`Umar) berkata: Aku telah mendengar Rasul saw berkata: “Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap sesuatu perkara itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, dan barangsiapa yang berhijrah dengan niat dunia yang ingin dikejanya, atau perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya itu kembali kepada apa yang diniatkannya itu.

Niat secara bahasa berarti *al-qashd*/maksud, sedangkan secara syara` sebagaimana terdapat dalam kitab *at-Talwih* yakni tujuan untuk melakukan ketaatan dengan cara *taqarrub*/pendekatan diri kepada Allah swt dalam bentuk perbuatan.<sup>14</sup> As-Subki menjelaskan, niat berfungsi untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, dan membedakan tingkatan sebagian ibadah dengan ibadah lainnya.<sup>15</sup> Hadis di atas *shahih* dan sangat

---

<sup>13</sup> Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Juz XVII (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), h. 274. Hadis ke-4.217.

<sup>14</sup> Zain al-`Abidin ibn Ibrahim ibn Najim, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1980), h. 29.

<sup>15</sup> Taj ad-Din `Abdul Wahhab ibn `Ali ibn `Abd al-Kafi as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1991), h. 68.

*masyhur*, dari hadis tersebut timbullah suatu kaidah fikih yakni *al-umuru bi maqashidiha*/segala perkara itu, tergantung dengan niatnya.<sup>16</sup>

Salah satu perkara yang diharamkan dalam perniagaan adalah meninggikan harga, sehingga membuat kesusahan pembeli, produk tersebut sangat dibutuhkan oleh pembeli, merupakan bahan pokok yang harus terpenuhi, seperti beras dan kebutuhan primer lainnya, apabila penjual dengan sengaja menaikkan harga terlampau tinggi dari kebiasaan, untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan dan kebutuhan masyarakat, tindakan itu sangat buruk dalam pandangan agama.

Orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, dan tindakan tidak terpuji dengan berbagai macam cara, seperti menaikkan harga barang makanan pokok, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak lazim, maka perbuatannya ini adalah suatu kezhaliman bagi umat manusia. Dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang kenaikan harga yang tidak lazim itu.<sup>17</sup> Pemerintah harus memaksanya untuk menjual barang

---

<sup>16</sup> `Abdur Rahman ibn Abu Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah, 1403 H), h. 9.

<sup>17</sup> Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`ad Syams ad-Din ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, Juz I (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 329.

dagangannya itu, dan harga disesuaikan dengan yang ada di pasaran sebelumnya.<sup>18</sup> `Abd al-Muhsin as-Salman mengatakan, sudah seharusnya bagi pihak pemerintah/ *wali al-amr*, untuk memaksa penjual dalam menjual harga bahan pokok dengan harga yang sesuai dan wajar, karena hal itu berhubungan dengan hajat *dharuri* orang lain.<sup>19</sup> banyak pendapat yang telah dituliskan di atas, baik itu Ibnu al-Qayyim al-Jauzi dan `Abd al-Muhsin as-Salman, menerangkan tentang kenaikan harga yang tidak lazim dilakukan oleh pembeli itu, dengan melakukan sesuatu upaya, seperti penimbunan barang, dan menahan barang, sehingga pada akhirnya ketika permintaan banyak, dengan mudah penjual menetapkan harga yang tidak wajar, melebihi harga yang biasa terdapat dalam pasar itu sendiri.

## F. Hipotesa

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumiyah al-Islamiyah*, dan kitab *Majmu` al-Fatawa*, ditambah lagi tulisan dari Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`ad Syams ad-Din ibn

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Abu Muhammad `Abd al-`Aziz ibn Muhammad ibn `Abd ar-Rahman ibn `Abd al-Muhsin as-Salman, *al-As'ilah wa al-Ajwabah al-Fiqhiyyah*, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma`arif, t.th), h. 88. Lihat juga Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam...*, h. 17.

Qayyim al-Jauziyyah bukunya yang berjudul *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, untuk sementara penulis berkesimpulan tentang penetapan harga/ *tas`ir* bahan pokok oleh pemerintah di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi perlu dilakukan, sesuai dengan yang terdapat dalam pendapat Ibnu Taimiyah.

Penetapan harga/ *tas`ir* dalam komoditi bahan pokok penting, tetapi perlu diperhatikan berbagai aspek, agar penjual tidak mengalami kerugian, jangan sampai pembeli merasa berat untuk membeli. Titik temu, antara permintaan dan penawaran, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli dijadikan acuan. Selain itu, proses mengikuti harga yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Dairi, perlu melaksanakan pemantauan dan sidak agar tidak terdapat kecurangan dari penjual, dengan cara menawarkan harga yang melebihi harga yang telah ditentukan, seandainya ini terjadi, harus diberikan sanksi administratif/ yakni teguran, bahkan tidak diperkenankan untuk berjualan di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Sekilas terasa ada penzhaliman, tapi sebenarnya tidak, karena hajat hidup orang banyak/ masyarakat diutamakan dari hajat kepentingan orang perorangan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris, metode yang digunakan adalah gabungan dari *field research*, dan *library research*. *Field research*, penelitian yang tampak, kaitannya dalam penelitian ini tentang menjual harga beras tidak sesuai dengan penetapan oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyah yang terjadi di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Secara *library research*/ studi pustaka, dengan cara mencari hukum-hukum berkaitan dengan penetapan harga/ *tasi`r* oleh pemerintah dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Penulis juga mencantumkan pendapat-pendapat dari ulama lainnya, dalam melihat permasalahan *tas`ir*/penetapan harga oleh pemerintah.

### 2. Pendekatan Masalah

#### a. *Sociological Approach*

Segi *sociological approach*/ pendekatan sosial, praktik menjual harga beras tidak sesuai dengan penetapan oleh pemerintah

menurut Ibnu Taimiyah yang terjadi di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

b. *Conceptual Approach*

Pendekatan lainnya adalah pendekatan *conceptual approach*/ pendekatan hukum yang tuliskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumiyah al-Islamiyah*, dan kitab *Majmu` al-Fatawa*. Tulisan dari Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`ad Syams ad-Din ibn Qayyim al-Jauziyyah bukunya yang berjudul *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*. Tulisan `Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-`Ashimi al-Hanbali an-Najdi dalam bukunya *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`*. Karya Abu Muhammad `Abd al-`Aziz ibn Muhammad ibn `Abd ar-Rahman ibn `Abd al-Muhsin as-Salman yang berjudul *al-As'ilah wa al-Ajwabah al-Fiqhiyyah*, tentang penetapan harga/ *tas`ir* bahan pokok oleh pemerintah di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Primer

Bahan primer dalam penelitian ini, hasil wawancara, hasil observasi, dan buku-buku karya Ibnu Taimiyah dan yang mempunyai pemikiran yang sama dengan beliau.

##### 1) Hasil Wawancara

Hasil wawancara dari nara sumber, yakni penjual dan pembeli serta masyarakat yang ada di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

##### 2) Hasil Observasi

Peneliti secara langsung turun langsung ke Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, untuk melihat dan memperhatikan aktivitas jual beli komoditi bahan pokok, dan melihat harga yang diperbandingkan dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Dairi.

##### 3) Buku-buku

Penelitian ini menjabarkan pemikiran dari Ibnu Taimiyah berkaitan dengan penetapan harga/ *tas`ir*, secara khusus buku-buku yang dijadikan referensi adalah tulisan beliau, yang terdapat dalam buku tulisannya yang berjudul *al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumiyah al-Islamiyah*, dan kitab *Majmu` al-Fatawa*. Kitab-kitab tulisan yang sama dengan beliau seperti kitab bukunya yang berjudul *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, tulisan Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`ad Syams ad-Din ibn Qayyim al-Jauziyyah. Buku *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`*, tulisan dari `Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-`Ashimi al-Hanbali an-Najdi. Buku *al-As`ilah wa al-Ajwabah al-Fiqhiyyah*, karya Abu Muhammad `Abd al-`Aziz ibn Muhammad ibn `Abd ar-Rahman ibn `Abd al-Muhsin as-Salman. Semua buku yang dituliskan tercantum di dalamnya masalah penetapan harga/ *tas`ir* bahan pokok oleh pemerintah.

b. Sekunder



Penulis mengambil tulisan dari kitab-kitab fikih, seperti kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *Fiqh as-Sunnah* *Fiqh`ala Mazhab al-Arba`ah*, karya al-Jaziri, dan kitab-kitab fikih mengkaji tentang *tas`ir* yang bisa penulis dapatkan.

c. Tersier

Sumber tersier, ensiklopedi, kamus bahasa, kamus hukum, jurnal dan lain-lain.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

Wawancara terbagi kepada dua bagian, yakni wawancara terstruktur dan wawancara terbuka. Wawancara terstruktur berupa wawancara yang menanyakan kepada nara sumber sesuai dengan pertanyaan yang telah ditulis/ dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara terbuka, sifat pertanyaannya bebas, tapi masih tetap berkaitan dengan *tas`ir*/penetapan harga oleh pemerintah.

b. Observasi

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Peneliti

melakukan tatap muka secara langsung dengan nara sumber, dan juga memperhatikan dengan langsung dan seksama transaksi jual beli komoditi pokok, berupa beras yang telah ditetapkan harganya oleh pemerintah Kabupaten Dairi.

c. Studi Dokumen

Selain informasi yang didapatkan dari observasi dan wawancara, penting juga untuk menggali informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen. Contohnya dokumen berkaitan dengan selebaran penentuan harga beras di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

## 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Sifat

Sifat penelitian ini deskriptif analisis, yakni memaparkan dan menjelaskan data-data yang didapatkan sewaktu penelitian, baik itu hasil wawancara, hasil observasi. Data-data yang telah didapatkan dianalisis sebaik dan secermat mungkin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan berkaitan dengan *tas`ir/*

penetapan harga di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

b. Metode

Metode penelitian ini adalah metode deduktif, penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum, kepada sesuatu yang khusus. Mendapatkan hasil penelitian dari wawancara, observasi, dan analisis kitab karangan Ibnu Taimiyah. Setelah didapatkan kesimpulan yang bersifat umum ini, maka bisa diarahkan kepada hal yang khusus berkaitan dengan *tas`ir*/ penetapan harga oleh pemerintah di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

c. Penyajian data

Penyajian skripsi ini berupa data kualitatif, penjelasan yang menggunakan bahasa, penjelasan, pemaparan dengan kata-kata kalimat, dan tidak terkait dengan program-program yang digunakan seperti dalam penelitian kuantitatif, yakni berupa angka dan hitung-hitungan, serta statistik.

## 6. Lokasi penelitian

Penelitian ini di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan Teori, konsep harga bahan pokok menurut Ibnu Taimiyah, kebijakan penetapan harga bahan pokok menurut pemerintah.

Bab III, Profil Pasar Sumbul dan profil Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi serta penetapan harga beras di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Bab IV, Hasil Penelitian, terdiri dari: Hukum menjual beras tidak sesuai dengan harga penetapan pemerintah menurut Ibnu Taimiyah, analisis penulis.

Bab V, Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, dan saran-saran.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**KONSEP HARGA BAHAN POKOK MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN**

**KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BAHAN POKOK MENURUT**

**PEMERINTAH**

**A. Konsep Harga Bahan Pokok Menurut Ibnu Taimiyah**

Mulianya suatu perdagangan tercantum dalam satu hadis dari Imam Ahmad, dalam riwayat Juma`i ibn `Umar yang didapatnya dari pamannya, hadisnya sebagai berikut:

عَنْ جَمِيعِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ خَالَهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ.<sup>20</sup>

Artinya: Dari Juma`i ibn `Umair, dari pamannya, telah berkata ia, Nabi saw ditanya tentang usaha yang paling utama, lantas Nabi saw menjawab, jual beli yang *mabrur*/ penuh kejujuran, dan pekerjaan seseorang dengan tangannya/ usahanya sendiri.

Syafei menerangkan, “jual beli mabrur dalam hadis tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain”.<sup>21</sup> Berkah menurut Tarigan, adalah “*al-khair al-ilahi*/kebaikan tuhan.

---

<sup>20</sup> Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah asy-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz XXXI (Kairo: Mu`assasah Qurthubah, t.th), h. 476. Hadis ke-15.276.

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. 3, h. 75.

Kebaikan ilahi adalah kebaikan yang bersumber dari Allah yang muncul tanpa diduga dan tak terhitung pada semua segi kehidupan, baik yang bersifat materi maupun non materi”.<sup>22</sup> Sehingga bisa dipahami, suatu keberkahan tidaklah mutlak dalam bentuk materi, adakalanya kesehatan, kesenangan, dan nilai-nilai kebaikan lainnya yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Sering kali usaha yang mulia ini, dirusak dengan tindakan kecurangan, dan mementingkan keuntungan semata, tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat dalam membutuhkan jenis bahan pokok tertentu untuk kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kecurangan adalah *ihthikar*/penimbunan barang.

Tujuan dari penimbunan barang itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan berkali lipat dari masyarakat, karena barang sedikit, atau jarang di pasaran, sehingga karena butuh dan terpaksa, maka masyarakat tetap melakukan pembelian. Dibutuhkan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal dalam perkara ini.

---

<sup>22</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis; Telaah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015), cet. 2, h. 26-27.

Herdiana menjelaskan, “dalam Islam pengawasan terbagi kepada dua macam, yakni pengawasan diri sendiri, dan pengawasan dari pihak luar”.<sup>23</sup> Di antara dua pengawasan tadi, pengawasan dari pihak luarlah yang terpenting. Kecenderungan manusia untuk mendapatkan keuntungan semata, tentu segala cara dilakukan, termasuk melakukan tindakan kecurangan, dalam hal ini melakukan penimbunan/ *al-ihthikar*, sehingga jual beli yang *mabrur* dan berkah bisa tercapai.

Ibnu Taimiyah memaknai *al-ihthikar*/ penimbunan, seperti yang terdapat dalam satu hadis Rasulullah saw, sebagai berikut:<sup>24</sup>

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.<sup>٢٥</sup>

Artinya: Dari Ma`mar ibn Abu Ma`mar (salah seorang dari Bani `Adi ibn Ka`ab), telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah swt, tidaklah melakukan penimbunan kecuali seorang itu adalah orang bersalah.

---

<sup>23</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, h. 135.

<sup>24</sup> Taqi ad-Din Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim ibn Taimiyah al-Harani al-Hanbali, *Majmu` al-Fatawa*, Juz XXVIII (Bairut: Dar al-Wafa', 2005), cet. 3, h. 75.

<sup>25</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn `Amru al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IX (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 305. Hadis ke-2.990. Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Juz V (Bairut: Dar al-Ma`rifah, t.th), h. 62. Hadis ke-1.188.

Seseorang yang melakukan penimbunan adalah orang yang sengaja menyimpan suatu barang atau komoditi tertentu, padahal itu adalah hajat hidup orang banyak, baik itu berupa makanan misalnya. Sengaja ia melakukan penimbunan/ menahan benda itu untuk disalurkan ke pasar, agar mendapatkan harga yang tidak biasa/ tinggi. Perbuatannya itu adalah suatu penzhaliman bagi manusia/ orang-orang yang hendak membeli, atau yang sedang membutuhkan.<sup>26</sup> Ulasannya di bawah ini:

فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِي يَعْمَدُ إِلَى شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ  
فِيحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَيُرِيدُ إِغْلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلخَلْقِ الْمُشْتَرِينَ.<sup>27</sup>

Artinya: Maka sesungguhnya *al-muhtakir*/ penimbun, ialah orang yang menyimpan barang dagangan untuk dijual kembali kepada pembeli, baik itu berupa makanan pokok, maka ia melakukan penimbunan dengan harapan untuk mendapatkan harga di luar dari biasanya, perbuatannya itu adalah merupakan suatu tindakan kezhaliman kepada pembeli/ masyarakat.

Pemerintah/ *wali al-amri* boleh memaksa *muhtakir*/ penimbun, agar menjual barang dagangannya, harga yang dijual adalah harga yang sesuai dengan harga pokok secara biasanya. Tindakan ini dikarenakan

---

<sup>26</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa*, h. 75.

<sup>27</sup> *Ibid.*



banyaknya hajat hidup masyarakat untuk mendapatkan barang yang ditimbun untuk mendapatkan harga tinggi tersebut.<sup>28</sup>

Penimbun tidak membutuhkan barang itu, hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, padahal masyarakat sangat membutuhkannya, dan dalam kondisi yang sangat lapar. Ibnu Taimiyah menekankan, dalam kondisi seperti ini orang yang menimbun itu dipaksa untuk menjual barang dagangannya yang ditimbunnya itu, dan menggunakan harga yang sesuai dengan kondisi biasanya.<sup>29</sup>

فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِيَمَةِ الْمِثْلِ.<sup>30</sup>

Artinya: Maka sesungguhnya dipaksa penimbun untuk menjual barang dagangannya kepada manusia, dengan harga yang sesuai dengan biasanya/ *qimah al-mitsil*.

Selain yang ditulis oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmu` al-Fatawa*, terdapat juga tulisan dari Al-`Ashimi tentang makna *al-ihthikar*/ menimbun, yakni: Haram hukumnya menimbun komoditi yang diperlukan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

masyarakat, dan merupakan kebutuhan primer. Makna *al-ihthikar* dijelaskan oleh beliau, seperti di bawah ini:

الاحتكار: هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، والمحتكر هو الذي يتلقى القافلة، فيشتري الطعام منهم ويريد إغلاءه على الناس، وهو ظالم لعمومهم.<sup>31</sup>

Artinya: *Al-ihthikar* ialah suatu tindakan dari penjual yang menahan/menyimpan barang dagagannya, ketika masyarakat sangat membutuhkannya, sedangkan pelakunya disebut *al-muhtakir*/penimbun, di tangannya perbuatan untuk menyimpan komoditi yang dibutuhkan itu. Ia berharap, ketika menjual makanan itu, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Perbuatannya itu adalah penzhaliman kepada masyarakat secara umum.

Sesuai dengan yang dicantumkan di atas, letak kejelekan dan keburukan dari tindakan *al-ihthikar*/ penimbunan adalah dapat merugikan orang lain, dan menyebabkan penjual menjadi orang yang bakhil dan berpikir untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa memperdulikan orang lain.

Menurut Ibnu Taimiyah penjual yang melakukan atau menentukan harga di luar dari harga kebiasaan, yang kenaikan harga itu dicurangi

---

<sup>31</sup> `Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-`Ashimi al-Hanbali an-Najdi, *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`*, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma`arif, 1397 H), cet. 1, h. 390.

dengan perbuatan penimbunan, maka menurut Ibnu Taimiyah *ulil amri/wali amri*, harus memaksa penjual tersebut agar menjual dagangannya kepada masyarakat, tidak hanya itu harga yang dijual mesti harga pasaran/*qimah al-mitsil*. Kalau seandainya tidak digubris, maka pemerintah bisa melarang orang itu untuk berjualan di pasar tersebut, karena tindakannya itu adalah sebuah penzhaliman kepada masyarakat lainnya, dalam hal ini pembeli.

Sifat-sifat seperti ini, sungguh amat terlarang dalam ajaran agama Islam. Karena hidup, bukanlah untuk hidup itu saja, tapi bagaimana hidup mempunyai efek positif, dan bermanfaat bagi orang lain, apapun bidang yang digeluti oleh orang tersebut. Sekali lagi, selain jual beli sangat bernilai dalam pandangan duniawi, seharusnya jual beli bisa dimanfaatkan untuk bisa mencapai redha Allah swt, dengan saling membantu, pengertian, mendahulukan orang banyak dibandingkan untuk kepentingan diri sendiri.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, ada sebagian pendapat yang mendalilkan sabda Rasulullah saw, agar tidak menentukan harga komoditi bahan pokok, dengan hadis tersebut, seolah-olah dalam pandangan agama, tidak boleh ikut campur dalam urusan kemashlahatan

umat dalam perdagangan, padahal menurut Ibnu Taimiyah, dalil hadis tersebut haruslah ditilik kembali dalam konteks umum, bukan konteks khusus. Hadis tersebut penulis cantumkan di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السُّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.<sup>32</sup>

Artinya: Dari Anas, Wahai Rasulullah tak ada ketetapan bahan (pokok), tetapkanlah bagi kami, Rasulullah saw menjawab, sesungguhnya Allah Maha Menetapkan (harga), Maha Menahan, Maha Melepaskan, Maha Luas, Maha Mengatur rezeki, dan aku berharap ketika kelak aku menjumpai-Nya, tak ada seorangpun yang menuntutku karena suatu kezhaliman, perkara darah dan jiwa.

Terlihat dengan jelas, hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis tersebut, di antaranya: Imam Ibn Majah, Imam at-Turmuzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan masih banyak riwayat yang menukilkan hadis di atas. Ibnu Taimiyah menjelaskan, beliau tidak menolak hadis di atas, hadis tersebut berkenaan dengan kondisi ekonomi yang tingkat fluktuasi (naik dan turunnya harga) terjadi secara normal, yakni kenaikan harga atau

---

<sup>32</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz IX h. 311. Hadis ke-2.994. Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Juz VI (Bairut: Dar al-`Ilmiyah, t.th), h. 443, hadis ke-2.191. At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Juz V h. 141. Hadis ke-1.235. Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah asy-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz III (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, t.th), h. 286. Hadis ke-14.809.

menurunnya harga di pasaran disebabkan kondisi yang lazim, tidak ada penimbunan, dan tidak sifat kecurangan dalam jual beli, tetapi dalam kondisi tertentu misalnya terdapat *muhtakir*/ penimbun, yang sengaja menimbun barang dagangannya yang merupakan komoditi pokok dalam suatu masyarakat. Ketika komoditi tersebut sudah tidak tampak lagi di pasaran, sedangkan masyarakat sangat membutuhkannya, barulah ia menjual barang dagangannya itu, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Bagi pembeli tidak ada pilihan lagi, selain tetap membeli barang dagangan yang ditawarkannya itu, tidak terdapat di pasaran.

Kondisi seperti ini, diperlukan suatu kekuatan dari pihak pemerintah untuk memaksa orang tersebut mengeluarkan barang dagangannya untuk dijual di masyarakat. Harga yang digunakan adalah *qimah al-mitsl*, yakni harga yang biasa terdapat di masyarakat, dan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan kontrol pihak pemerintah. Kondisi yang seperti inilah mereka para *muhtakir*/ penimbun barang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang pantas. Sangat keras, Ibnu Taimiyah menuliskan:

فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.<sup>33</sup>

Artinya : Maka di sini wajib atas mereka untuk menjual harga dagangan itu dengan harga wajar/ *qimah al-mitsl*, dan tidak boleh mereka para penimbun itu yang menentukan harga, melainkan harus dengan harga yang sewajarnya, maka itu diwajibkan atas mereka, sesuai dengan yang diperintahkan Allah swt dengannya.

## B. Kebijakan Penetapan Harga Bahan Pokok Menurut Pemerintah

Peraturan Pemerintah oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang penulis dapat, Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras ada tercantum beberapa hal penting terkait dengan pembahasan skripsi ini. Tertulis bahwa landasan pertimbangan dari penetapan harga tersebut di antaranya adalah: “Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras di konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras”.<sup>34</sup>

Peraturan ini mencantumkan bahan-bahan dan landasan hukum, baik berupa perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain sebagainya. Dalam putusannya, tersebut diterangkan berkaitan tentang

---

<sup>33</sup> Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam...*, h. 18.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

definisi beras, pembagian macam beras yang diklasifikasikan kepada dua macam, yakni beras medium dan beras premium.<sup>35</sup>

Pada bagian ke-4 Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di sebutkan: “Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya”.<sup>36</sup> Dijelaskan pada bagian setelahnya, bahwa mengenai Harga Eceran Tertinggi itu sendiri, mencakup di dalamnya jenis beras medium dan juga beras premium.

Ditegaskan pada pasal 3, bahwa: “Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)”. Ini berarti, setiap penjual tidak boleh melakukan penentuan harga secara semena-mena, dan mesti mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian

---

<sup>35</sup> Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, tentang Kementerian Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/ 2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Perdagangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Peraturan ini, tidak hanya mengatur penjual agar mentaati ketentuan mengenai patokan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tapi perintah yang tidak boleh disepelekan, karena berakibat kepada sanksi yang diterapkan kepada penjual yang enggan untuk mengikuti peraturan yang dimaksud.

Pemberian sanksi pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tersebut, dengan tegas dan lugas, terdapat dalam Pasal 7, yakni:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh pejabat penerbit izin”.<sup>37</sup>

Penting untuk diperhatikan oleh penjual, agar mengindahkan peraturan tersebut, jangan sampai untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, dan juga bermain dalam ketidaktahuan pembeli mengenai HET tersebut, menyebabkan penjual melakukan suatu tindakan yang tidak saja

---

<sup>37</sup> *Ibid.*



merugikan pihak pembeli, tapi juga pihak penjual itu sendiri. Yakni dengan adanya pencabutan izin usahanya.

Pasal 9 dicantumkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, ternyata telah ada peraturan yang sama, pada tahun yang sama, hanya berbeda pada nomor surat, dan isi dari peraturan tersebut. Adapun nomor peraturan itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 / M-DAG/PER/ 5/ 2017, tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Berarti peraturan yang terbaru, secara tidak langsung menganulir atau membatalkan peraturan yang telah ada sebelumnya, kalau menggunakan bahasa dari Peraturan Menteri disebut dengan: “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Peraturan Menteri ini sendiri ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 2017 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Enggartiasto Lukita.

Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras ini melampirkan beberapa ketentuan lebih spesifik lainnya, yakni:

1). Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan beras medium Rp. 9.450/kg, dan beras premium Rp. 12.800/kg. 2). Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan beras medium Rp. 9.450/kg, dan beras premium Rp. 13.300/kg. 3). Bali dan Nusa Tenggara Barat beras medium Rp. 9.450/kg, dan beras premium Rp. 12.800/kg. 4). Nusa Tenggara Timur beras medium Rp. 9.950/kg, dan beras premium Rp. 13.300/kg. 5). Sulawesi beras medium Rp. 9.450/kg, dan beras premium Rp. 12.800/kg. 6). Kalimantan beras medium Rp. 9.950, dan beras premium Rp. 13.300. 7). Maluku beras medium Rp. 10.250/kg, dan beras premium Rp. 13.600/kg. 8). Papua beras medium Rp. 10.250/kg, dan beras premium Rp. 13.600/kg.<sup>38</sup>

Bersama bisa dilihat, pada bagian lampiran Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras terdapat beberapa daerah yang dijadikan standar mengenai ketetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada bagian kedua, disebutkan daerah Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan bahwa mengenai patokan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah terkait harga beras berkisar: “Beras medium Rp. 9.450/kg, dan beras premium Rp. 13.300/kg”.

Ini berarti, harga yang lebih tinggi dari kedua harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah tindakan melanggar hukum. Penegakan hukumnya tersebut tidak secara langsung menutup usaha dari penjual, tapi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

dilakukan dengan cara memberikan peringatan beberapa kali, hingga apabila teguran yang telah disampaikan tidak digubris, maka izin usaha dari penjualan beras tersebut akan dicabut oleh pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, walaupun tidak semua bahan-bahan makanan, adalah merupakan bentuk rasa aman, dan pengamanan yang tertinggi dalam menjamin keberlangsungan rakyatnya. Ketentuan itu diutamakan adalah beras, yang merupakan bahan pokok dan primer dalam menjamin kehidupan masyarakat. Adanya peraturan ini pihak-pihak yang telah mematok harga tinggi dalam komoditi beras tersebut, mau mengindahkan, dan tidak berpikir egois serta mementingkan diri sendiri.

Dua perspektif di atas, satu sisi adalah pandangan dari Ibnu Taimiyah, kemudian relevansinya dengan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, adalah mutlak dipertahankan, Karena pengaturan tersebut sifatnya adalah *dharuri*/ sesuatu yang mendesak dan penting bagi masyarakat secara luas.

**BAB III**  
**PROFIL PASAR SUMBUL DAN PROFIL KELURAHAN PEGAGAN JULU 1**  
**KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI SERTA PENETAPAN HARGA**  
**BERAS DI PASAR SUMBUL**

**A. Profil Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul  
Kabupaten Dairi**

Informasi berkaitan dengan Pasar Sumbul sangat minim yang bisa penulis kumpulkan. Hal ini dikarenakan, Pasar Sumbul itu sendiri telah lama berdiri, sesuai dengan keterangan Lurah setempat, beliau menuturkan:

Setahu saya, Pasar Sumbul ini sudah lama ada, bahkan waktu itu seingat saya, sewaktu kecil orang tua saya sering mengajak saya ke Pasar Sumbul tersebut. Kalau diperkirakan, Pasar Sumbul itu sendiri telah ada semenjak akhir tahun 1950 an. Sehingga, telah lamanya pasar tersebut berdiri, semakin lama semakin terkenal, dan tetap eksis hingga saat ini.<sup>39</sup>

Nara sumber menerangkan, awal mula kepemilikan tanah, hingga saat ini dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Kecamatan Pegagan Julu 1, sebagai berikut:

Secara kepemilikan, Pasar Sumbul ini dulunya tanah tempat berjualan adalah milik pribadi, baru pada tahun 1980 an, tanah tersebut dibeli oleh Pemerintahan Dairi, karena banyaknya masyarakat yang mengadu peruntungan di tempat itu. Saat ini, dari segi

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

pertanggungjawaban, dan pihak yang berwenang untuk mengelola Pasar Sumbul, baik dari segi pembiayaan uang sewa, relokasi dan renovasi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi, yang mewakilkannya kepada Kantor Kecamatan Pegagan Julu 1. Sedangkan kami, kata nara sumber dari pihak kelurahan Sumbul hanya melaporkan aktivitas-aktivitas yang penting, baik pengaduan masyarakat, maupun kritik terhadap Pasar Sumbul itu sendiri, yang kemudian kami sampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dan Kecamatan Pegagan Julu 1.<sup>40</sup>

Pasar Sumbul sendiri, secara keramaian bisa dikatakan termasuk pasar yang cukup ramai, dan besar, yang menjual beragam jenis komoditi barang, dari keperluan tertier hingga keperluan primer, seperti beras, telur dan lain sebagainya.

Pasar Sumbul sendiri tidaklah ramai setiap harinya, hanya pada hari Selasa saja, dimulai dari pada Senin sore, hingga Selasa malam. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa penjual yang tetap menggelar dagangan di dalam pasar tersebut, dikarenakan mereka bermukim secara permanen di tempat itu, dengan sistem sewa yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah setempat, dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019. Wawancara dengan Bapak Robi Lingga, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

Selain itu, pada hari lainnya, banyaknya juga terdapat penjual yang berjualan di luar areal dari Pasar Sumbul itu sendiri, tapi model jualannya tidak banyak. Sesuai dengan keterangan dari Lurah setempat, mereka sebenarnya telah mengingatkan agar jangan menggelar dagangan di luar dari Pasar Sumbul, karena bisa mengganggu akses orang yang berlalu lalang.

Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan dari penjual, penyebab mereka berjualan di luar areal Pasar Sumbul, karena pada hari selain hari Selasa, pasar tersebut tidak ramai, jadi masyarakat yang datang untuk membeli pun sedikit, maka penjual menggelar jualan di luar Pasar Sumbul, mengharapkan agar pembeli yang berlalu lalang, atau sekedar melintas itulah jadi harapan untuk membeli barang dagangan mereka.<sup>41</sup>

## **B. Profil Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi<sup>42</sup>**

### **1. Batas Wilayah**

Kelurahan Pegagan Julu 1 berbatasan sebelah Utara dengan Desa Pegagan Julu III dan VI, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pegagan Julu

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna Sitanggung, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Sabtu, 13 Juli 2019. Wawancara dengan Bapak Jarin Sigiuro, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Sabtu, 13 Juli 2019.

<sup>42</sup> Sumber Data Profil Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

II dan Tanjung Beringin, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pegagan Julu II dan IV, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sitinjo.

## **2. Luas Wilayah**

Pegagan Julu 1 mempunyai luas wilayah 378 ha, dengan tinggi di atas permukaan laut/ mpdl 1.200 meter. Terdiri dari areal sawah dengan luas 166 Ha, ladang tegalan 130 ha, pemukiman 66 ha, lapangan sepak bola 1 ha, pekan 5 ha, kuburan 2 ha, lain-lain/ perkantoran 8 ha.

## **3. Sarana Pendidikan**

Kelurahan Pegagan Julu 1 mempunyai sarana pendidikan, dari tingkat TK hingga SMA/ SMK, yakni: TK Swasta 3 unit, SD Swasta 2 unit, SD Negeri 3 unit, SLTP Swasta 1 unit, SLTP Negeri 2 unit, SMU Swasta 1 unit, SMU Negeri 1 unit, SMK Swasta 2 unit, Kursus Bahasa Inggris 2 unit.

## **4. Kependudukan**

### **a. Jumlah penduduk**

Jumlah penduduk Pegagan Julu 1 sebanyak 6.577 jiwa, dengan rasio perbandingan laki-laki sebanyak 3.298 jiwa, dan perempuan berjumlah 3.279 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga terdiri dari 1.483 kepala keluarga.

### **b. Jumlah penduduk berdasarkan agama**

Kelurahan Pegagan Julu 1 terdapat beberapa agama dengan variasi jumlah pemeluk yang berbeda-beda, yang paling banyak beragama Protestan, urainnya sebagai berikut: Pemeluk agama Islam berjumlah 260 jiwa, Protestan 5.525 jiwa, dan Katholik 382 jiwa.

c. Jumlah berdasarkan suku bangsa

Suku Pak pak 1.572 jiwa, Toba 3.173 jiwa, Simalungun 1.356 jiwa, Karo 290 jiwa dan Jawa, Padang, Tapsel, Nias sebanyak 192 jiwa.

d. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Kelurahan Pegagan Julu 1 masyarakatnya mempunyai bermacam-macam jenis pekerjaan, yakni Petani 2.175 jiwa, PNS 230 jiwa, TNI/ POLRI 37 jiwa, Pensiunan 225 jiwa, Pedangan/ Pengusaha 680 jiwa, lain-lain meliputi pelajar mahasiswa sebanyak 3.080 jiwa.

e. Perekonomian dan Jasa

Kelurahan Pegagan Julu 1 mempunyai beberapa unit jasa dan penggerak motor ekonomi di daerah tersebut, terdiri dari KUD 1 unit, KPN 1 unit, CU 6 unit, Pekan 1 unit, Bank 3 unit, Kedai Kopi 20 unit, Kedai Nasi 14 unit, Kelontong 21 unit, Toko Bangunan 5 unit, Toko Pertanian 10 unit, Bengkel Roda Dua 14 unit, Hotel atau Penginapan 2 unit, Kilang Padi 3 unit,



Gedung Serba Guna 3 unit, Usaha Jahit 10 unit, Usaha Pangkas 4 unit, Salon 7 unit, Toko Mas 7 unit.

f. Agrobisnis dan Ternak

Kelurahan Pegagan Julu 1 mempunyai produksi dari sektor pertanian, di antaranya padi, jagung, kubis, kentang, sawi, teorng, buncis, tomat, cabe, ubi jalar, ubi kayu, kopi robusta, kopi arabica. Sedangkan ternak yang dikembangbiakkan di daerah itu, ayam, itik, kambing, kerbau, babi dan berbagai jenis unggas.

### 5. Organisatoris di Kelurahan Pegagan Julu 1

Menjabat sebagai lurah Sumbul saat ini adalah Bapak Burhan Sagala, yang mempunyai sekretaris lurah bernama Bentina Manalu, kemudian mempunyai 4 Kasi. Yakni 1). Kasi Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum dikepalai oleh Juster Banjarnahor, 2). Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikepalai oleh rupina Manjorang, 3). Kasi Perekonomian dan Pembangunan dikepalai oleh Dwita Pandiangan, serta 4). Kasi Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Partumpuan Pandiangan.

Selain keempat bagian seksi/ sektor di atas, terdapat juga 8 kepala lingkungan, mereka bertanggung jawab terhadap lingkungannya masing-

masing, yakni: 1). Kepala Lingkungan I (Aston Sihite), 2). Kepala Lingkungan II (Saut Lingga), 3). Kepala Lingkungan III (Tober Sihite), 4). Kepala Lingkungan IV (Edison Lingga), 5). Kepala Lingkungan V (Darling Sitanggung), 6). Kepala Lingkungan VI (Serwan Sembiring), 7). Kepala Lingkungan VII (Sudirman Tondang), 8). Kepala Lingkungan VIII (Mananter Pasaribu).

### **C. Penetapan Harga Beras Di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi**

Berkaitan penetapan harga beras di Pasar Sumbul, sesuai dengan temuan di lapangan. Terdapat ada tiga model penjual di tempat tersebut. Secara umum, Pasar Sumbul ini hanya ramai pada hari Selasa, tepatnya pada Senin sore, hingga Selasa malam. Selebihnya tetap masih bisa dijumpai beberapa penjual yang menjajakan jualannya di pasar tersebut. Hal ini dikarenakan, sebagian kecil yang masih berjualan di dalam pasar, pada hari selain hari Selasa, adalah mereka yang mempunyai tempat jualan permanen, yang mereka dapatkan secara sewa berjangka panjang, dan tokohnya pun lumayan besar.

Pantauan penulis, sewaktu melakukan wawancara terdapat paling tidak ada 7 tokoh yang buka, setiap harinya sisanya hanya buka pada hari Selasa karena mengharapkan pengunjung yang ramai pada hari tersebut. Khusus pada hari Selasa, biasanya penertiban agak diintensifkan, artinya tidak diperbolehkan berjualan di luar Pasar Sumbul. Akan tetapi, pada hari lainnya karena alasan bukan hari ramai, maka didapati penjual yang berjualan di luar dari Pasar Sumbul. Penjual beralasan, dikarenakan pada hari selain hari selasa agak sepi, sedangkan pembeli cenderung tidak mau masuk ke pasar, maka sebagian penjual akhirnya lebih memilih berjualan di luar pasar tersebut.

Walaupun sebenarnya, tindakan penjual yang berjualan di luar pasar tersebut tidak dibenarkan oleh pihak pasar, dan pihak keamanan terkait, karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di tempat itu. Dikarenakan peraturan tidak terlalu ketat pada hari selain hari Selasa, maka bisa ditemukan banyaknya penjual yang berjualan di luar Pasar Sumbul. Pedagang yang menggelar jualannya di luar Pasar Sumbul, cenderung merupakan jualan buah-buahan, dan jarang sekali di dapati jualan beras, karena sangat sulit untuk membawa beras yang berkarung-karung.

Sedangkan bagi penjual yang mempunyai toko permanen di dalam Pasar Sumbul, maka mereka biasanya tetap membuka tokonya di luar hari Selasa, meskipun pengunjung agak sepi.

Keterangan di atas bisa diketahui, paling tidak terdapat 3 model penjual di Pasar Sumbul, 1). Penjual yang mempunyai toko/ kedai yang lumayan besar, dan membuka jualannya setiap hari, 2). Penjual yang mempunyai toko/ kedai yang tidak terlalu besar, dan kadang buka kadang tidak di hari selain hari Selasa, 3). Penjual yang kadang berjualan di dalam dan di luar, dan barang dagangannya bukan merupakan bahan-bahan pokok.

Model penjual 1 dan ke-2 adalah mereka yang menjual beras di Pasar Sumbul. Dan menjadi objek wawancara dan observasi yang penulis lakukan. Sewaktu melakukan observasi penulis mendapatkan beberapa orang yang mau untuk diwawancarai, baik dari pihak pembeli, penjual dan juga Lurah Pegagan Julu 1.

Sewaktu penulis melakukan observasi, penulis diperkenankan untuk bertanya kepada Bapak Girsak, salah seorang penjual yang telah lama berjualan di Pasar tersebut. Di antara banyaknya penjual yang sempat di

wawancarai, beliau termasuk orang lama yang berjualan di tempat ini. walaupun sesuai dengan keterangan Lurah Pegagan Juli 1, bahwa Pasar Sumbul telah lama ada, bahkan sewaktu beliau masih kelas SD. Untuk kesempatan penelitian ini, penulis tidak menjumpai penjual yang lebih lama dibandingkan Bapak Hendri Girsak. Beliau menuturkan:

Saya telah lama berjualan di Pasar Sumbul ini, tokoh kami sudah ada sejak tahun 1980-an. Karena ramai dibandingkan pasar yang ada di Kecamatan lainnya. Tetapi, di tempat kami ini, hanya hari Selasa saja yang ramai, sedangkan hari lainnya tidak.

Penulis juga bertanya, mengenai penjualan yang beliau lakukan setiap bulannya, apakah di tempat beliau banyak peminat untuk melakukan akses jual beli beras. Tidak tanggung-tanggung, beliau mengatakan bahwa dalam sebulan saja, beliau mampu menjual beras isi 15 kg/karung sebanyak 250 karung/ sak. Bapak Hendri Girsak menuturkan: “Untuk saat ini, kami bisa menjual hingga 250 sak/ bulan yang isi 15 kg”.

Perputaran uang di tempat beliau cukup besar, itu hanya khusus penjualan beras saja, belum lagi komoditi atau barang-barang lain yang beliau jual. Mengenai jenis beras yang dijual, beliau mengatakan: “Toko kami menjual hanya dua jenis beras, yakni beras lokal/ beras ramos, dan beras Cap

Pulo Wangi, yang perkilonya Rp. 19.000,-, dan beras ini yang paling bagus.

Kalau beras lokal harganya hanya berkisar 14.000/kg”.

Informasi yang didapatkan, bahwa Bapak Hendri Girsak menjual beras dengan harga 2 macam, dengan kelas yang bermutu dan kelas agak kurang mutunya. Hanya dua macam saja. Bisa dilihat, harga yang ditawarkan oleh beliau kepada pembeli yakni beras lokal/ beras ramos, dan beras Cap Pulo Wangi, yang perkilonya Rp. 19.000,-, dan beras ini yang paling bagus. Kalau beras lokal harganya hanya berkisar 14.000/kg”. Ini mengejutkan bagi penulis, karena sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah hanya berkisar Rp. 9.450/kg untuk beras medium, dan Rp. 13.300/kg untuk beras premium. Rata-rata selisih harga dari ketentuan pemerintah Rp.5.000,- hingga Rp.6.000,-/ kg nya.

Penulis sempat menanyakan tentang pengetahuan beliau tentang peraturan pemerintah yang menentukan ambang batas harga beras, Bapak Hendri Girsak menjawab:

Pernah sekali, tapi saya lupa. Karena sosialisasinya kurang, jadi tidak begitu diperhatikan oleh kami sebagai penjual. Makanya, penentuan harga ini kami yang tentukan sesuai dengan modal, dan mendapatkan keuntungan tertentu. Kami hanya menawarkan barang dan harganya,

dan tidak memaksa, kalau mau yang dibeli, kalau tidak ya tidak mengapa.<sup>43</sup>

Beliau melanjutkan, bahwa tidak pernah melakukan paksaan kepada pembeli, dan juga alasan penetapan harga yang ditentukan oleh penjual, sebagai berikut:

Namanya juga jual beli. Kami tidak pernah memaksa orang untuk membeli beras kami. Kalau tawar menawar memang ada, tapi kami juga tidak ingin rugi, karena banyak biaya jasa yang dikeluarkan, dari upah angkut, dan juga kadang goni yang rusak, sehingga mengurangi kadar isi dari zak beras yang ada di toko kami. Karena, tentu hal itu menjadi pertimbangan kami dalam menentukan harga.<sup>44</sup>

Terhadap kapan biasanya kenaikan harga itu terjadi, beliau menjelaskannya kepada penulis, sebagai berikut:

Kenaikan harga biasanya terjadi pada menjelang hari-hari besar, seperti hari raya, natal, tahun baru dan lain-lain. tentu, kami akan mengikuti harga pasar, kalau tinggi ya kami naikkan, kalau rendah, ya kami kurangi sedikit. Pokoknya, jangan sampai kami mengalami kerugian dari jual beli ini.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Girsak, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Girsak, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Girsak, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

Penulis bertanya kepada Ibu Fitri Munthe, tentang sejak kapan berjualan, dan bagaimana siklus atau perputaran uang dalam beras tersebut, serta macam jenis yang dijual, beliau mengatakan:

Saya berjualan sudah lama, tapi luma tahun berapa tepatnya. Dalam 1 bulan 20 sak. Cap Mawar, dan beras Merah/ beras kampung. Beras Mawar yang 15 kg dijual Rp. 170.000/ karung. Beras Merah yang 15 kg dijual Rp. 190.000/ karung.<sup>46</sup>

Sesuai dengan tercantum di atas, Ibu Fitri Munthe menjual beras medium dengan harga Rp. 170.000/ karung isi 15 kg, itu berarti sekitar 11.333 perkilogram. Sedangkan Beras Merah yang 15 kg dijual Rp. 190.000/ karung, atau sekitar Rp. 12.666,- / kg. Dengan catatan beras yang dibeli konsumen atau pembeli itu persak/ pergoni. Kalau seandainya perkilogram/ perliter maka akan ada tambahan Rp. 1.000,- hingga Rp.1.500 perkilogramnya.

Berkaitan dengan jenis beras yang paling banyak dikonsumsi, beliau menjelaskan: “Kalau perkara yang mana yang banyak laku, itu tergantung

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Munthe, Penjual di Kelurahan Pegagan Juli 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Senin, 15 Juli 2019.



pembelinya. Yang suka dan doyan beras model mana. Kami hanya menyediakan permintaan saja”.<sup>47</sup>

Penulis bertanya mengenai ketentuan harga, siapa yang paling dominan untuk hal itu, beliau menjelaskan:

Tidak ada mematok harga, harga hanya ditentukan oleh penjual itu sendiri. Kenaikan harga biasanya terjadi pada menjelang hari-hari besar, seperti hari raya, natal, tahun baru dan lain-lain. Karena karyawannya pulang kampung, jadi tak ada pemasokan beras, maka harga jadi tinggi.<sup>48</sup>

Berbeda dengan penjelasan dari Bapak Hendri Girsak, Ibu Fitri Munthe tidak mengetahui ada penentuan harga. Harga hanya ditentukan oleh penjual itu sendiri, yang disesuaikan dengan modal di tambah biaya yang dikeluarkan, dan ditambah beberapa persen keuntungan. Dari sini dapat diketahui, adanya pengetahuan yang berbeda antara setiap pembeli terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di satu sisi, Bapak Hendri Girsak mengetahui, tapi tidak tau persis, sedangkan di satu sisi lainnya penjelasan dari Ibu Fitri Munthe, beliau tidak pernah tau adanya penentuan mengenai ambang batas harga beras.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Munthe, Penjual di Kelurahan Pegagan Juli 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Senin, 15 Juli 2019.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Munthe, Penjual di Kelurahan Pegagan Juli 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Senin, 15 Juli 2019.

Terhadap observasi dan wawancara yang penulis lakukan, selanjutnya untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas lagi mengenai apakah masyarakat baik penjual dan pembeli mengetahui tentang adanya batasan harga beras yang telah ditentukan oleh pemerintah, penulis berkesempatan untuk mencari jawaban dari Lurah Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Bapak Burhan Sagala menjelaskan mengenai apakah beliau mengetahui peraturan yang penulis maksudkan terkait ketentuan harga beras oleh pemerintah:

Saya tidak mengetahui adanya patokan harga dari pemerintah, kalau ada tentu kami akan laksanakan. Jadi, sampai saat ini belum ada berita yang saya dapatkan.<sup>49</sup>

Jawaban dari nara sumber, tidak mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah mengenai ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) dalam komoditi beras menjadi pertanyaan tersendiri bagi penulis. Tapi, mungkin karena kurang terosialisasinya peraturan tersebut, dan tidak pernah terjadinya geliat gelisahan yang tampak jelas di masyarakat, maka permasalahan ini pun tidak dianggap menjadi hal yang perlu untuk diketahui mekanismenya, dan pemahaman mengenai peraturan itu. Seperti ungkapan beliau: “Sampai saat

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

ini, belum ada komplain dari pembeli, tinggal lagi bagi pembeli, kalau merasa tinggi, jangan dibeli”.<sup>50</sup>

Terhadap ada atau tidaknya komplain dari masyarakat, penulis mewawancarai Ibu Ernawati Lingga terhadap harga beras, beliau menuturkan:

Saat ini, hidup sudah terasa makin susah, harga-harga mahal, terutama beras. Bisa dikatakan harga beras naik selalu, tidak pernah turun. Kalau pun turun, hanya beberapa ratus saja, sedangkan naiknya bisa mencapai Rp. 3.000,- hingga Rp. 4.000,-.<sup>51</sup> Biasanya kenaikan pada hari raya, menjelang tahun baru, tapi sakitnya, kalau sudah naik, tak pernah mau turun itu harga. Kami sebagai penjual hanya bisa menawar, walaupun diberi beberapa selisih harga, kalau mau kurangnya lebih banyak, harus beli satu karung yang 15 kg/karung itu. Padahal, kalau harus membeli satu karung, tentu sangat sulit sekali, walaupun perbedaan harga bisa mencapai Rp. 2.000,-.<sup>52</sup> Nara sumber melanjutkan:

Kalau sudah seperti ini, terpaksa harus dibeli, karena kita kan makan nasi, mana bisa bertahan makan ubi atau jagung. Seharusnya pembeli memperhatikan kondisi pembeli. Pihak kelurahan pun tidak mau turun tangan mengenai mahalnya harga, dan tingginya harga.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Ernawati Lingga, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Ernawati Lingga, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Ernawati Lingga, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

Sesuai dengan keterangan yang bisa diambil dari Ibu Ernawati Lingga, ternyata tingginya harga beras beberapa tahun belakangan ini, khususnya menjelang hari-hari besar, membuat harga beras naik, dan tidak pernah turun dengan harga yang signifikan. Tidak berbanding lurus antara kenaikan harga dengan turunnya harga. Seolah-olah, dengan alasan hari-hari besar itulah menjadi momen penjual untuk menaikkan harga beras.<sup>54</sup>

Walaupun dalam pantauan penulis, beras masih mudah dijumpai, oleh sebab itu, di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ini tindakan *ihthikar*/penimbunan tidak terjadi, tapi tetap saja kenaikan harga terjadi, bahkan melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mengenai kenaikan harga yang cukup tinggi ini juga dikeluhkan oleh pembeli yang lainnya, yakni Ibu Hikmah Pasaribu dan Ibu Rika Saut. Keduanya mempunyai pendapat yang sama, bahwa beberapa tahun belakangan ini terjadinya harga yang cukup tinggi, sehingga membuat daya

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Hikmah Pasaribu, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Kamis, 11 Juli 2019. Wawancara dengan Ibu Rika Saut, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Sabtu, 13 Juli 2019.

beli masyarakat menjadi berkurang. Padahal beras adalah barang yang sangat diperlukan bagi mereka.

Berkaitan dengan tawar menawar harga beras, sesuai dengan informasi pembeli, tetap ada terjadi tapi tidak bisa berkurang dengan harga biasa, hanya beberapa rupiah saja. Mereka sebagai pembeli hanya bisa pasrah, dan berharap harga beras bisa berkurang, dan seperti tahun-tahun sebelumnya.<sup>55</sup>

Penjelasan dari Bapak Burhan Sagala yang bisa penulis pahami, bahwa beliau menginginkan agar pihak terkait tetap melakukan pengontrolan harga, agar terjadinya keseimbangan antara penjual dan pembeli, ulasannya sebagai berikut:

Walaupun belum ada, dari Dinas Pendapatan mengenai ambang batas, seharusnya harga itu disesuaikan, jangan tinggi, supaya ada keseimbangan antara penjual dan pembeli. Kalau sudah turun peraturannya, maka kami cukup melaporkannya saja.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Hikmah Pasaribu, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Kamis, 11 Juli 2019. Wawancara dengan Ibu Rika Saut, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Sabtu, 13 Juli 2019.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

Penulis kembali bertanya, seandainya terdapat penjual yang menawarkan harga beras lebih tinggi dari ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah, beliau menjelaskan:

Kalau penjual tetap menaikkan harga, maka kami hanya bisa memberikan nasehat, atau himbauan. Kalau mereka memaksa tetap menjual beras dengan harga tinggi, tentu masyarakat tidak mau membeli. Kalau itu terjadi, biasanya penjual akan pindah ke tempat lain.<sup>57</sup>

Ibu Domina Br. Monjorang bercerita mengenai sejak kapan dia berjualan, dan mulai jam berapa, dan tentang pasokan penjualan dan pembelian beras di tokonya, sebagai berikut:

Saya berjualan semenjak tahun 2000-an. Jualan mulai pukul 06.00 s/d 18.00 wib. Perputaran beras di tempat kami bisa sampai 1 ton setiap minggunya. Sedangkan beras lokal 100 karung/ minggu. Jenis beras yang dijual hanya dua, yakni beras lokal/ beras merah, dan beras Cap Mawar.

Diketahui toko beliau termasuk toko yang laris dan banyak pembeli, khususnya untuk komoditi beras. Ini terbukti, banyaknya jumlah beras yang didistribusikan ke masyarakat, hingga 100 karung/ minggunya, dan rata-rata selama 1 minggu saja bisa mencapai 1 ton beras. Ibu Domina Br. Monjorang melanjutkan penjelasannya mengenai harga yang ditawarkannya kepada

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

pembeli, yakni: “Jenis beras yang disukai masyarakat, beras lokal, harga perliter Rp. 18.000,- Naik turun harga, biasanya kalau musim panen bisa “dingin” harga, kalau kurang panen bisa “panas” harga. Ketentuan harga berdasarkan pasaran”.<sup>58</sup>

Harga yang ditawarkan oleh Ibu Domina Br. Monjorang lumayan tinggi, yakni perliter Rp. 18.000, ini berarti selisih harga dari ambang batas yang telah ditentukan oleh pemerintah berkisar hampir Rp.5.000,- rupiah setiap kilogramnya. Kalau dikalikan saja, setiap karung yang paling kecil adalah seberat 15 kg, maka kalau dikalikan Rp. 5.000,- maka dalam satu karung beras bisa mencapai untung kotor sekitar Rp. 75.000,-. Sungguh membuat penulis terkejut, maka wajar saja dibandingkan dengan toko-toko lainnya di Pasar Sumbul, toko beras terkesan agak mewah dibandingkan toko-toko lainnya. Maklum saja, toko yang barang jualannya harus menggunakan modal yang cukup besar, tentu akan meraup keuntungan yang lebih besar pula, apalagi kalau ditilik dari segi tawaran harga yang jauh tinggi dari ambang batas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Domina Br. Monjorang, Penjual di Kelurahan Pegagan Juli 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

Harga Eceran Tertinggi Beras ini melampirkan beberapa ketentuan lebih spesifik lainnya, yakni: “Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan beras medium Rp. 9.450/kg, dan beras premium Rp. 13.300/kg”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Hukum Menjual Beras Tidak Sesuai Dengan Harga Penetapan Pemerintah Menurut Ibnu Taimiyah

Pemerintah/ *wali al-amri* boleh memaksa *muhtakir*/penimbun, agar menjual barang dagangannya, dengan ketentuan harga yang dijual adalah harga yang sesuai dengan harga pokok secara biasanya. Tindakan ini dikarenakan banyaknya hajat hidup masyarakat untuk mendapatkan barang yang ditimbun untuk mendapatkan harga tinggi tersebut.<sup>60</sup>

Penimbun tidak membutuhkan barang itu, hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, padahal masyarakat sangat membutuhkannya, dan dalam kondisi yang sangat lapar. Ibnu Taimiyah menekankan, kondisi seperti ini orang yang menimbun itu dipaksa untuk menjual barang dagannya yang ditimbunnya itu, dan menggunakan harga sesuai dengan kondisi biasanya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Taqi ad-Din Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim ibn Taimiyah al-Harani al-Hanbali, *Majmu` al-Fatawa*, Juz XXVIII (Bairut: Dar al-Wafa', 2005), cet. 3, h. 75.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Salah satu perkara yang sangat diharamkan dalam perniagaan adalah *ihthikar*/ penimbunan, karena mengganggu sistem yang telah ada di tengah masyarakat, dengan niat sengaja menghilangkan atau menyembunyikan satu komoditi atau jenis barang tertentu, merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga pemerintah harus memaksanya untuk menjual barang dagangannya itu, dan harga disesuaikan dengan yang ada di pasaran sebelumnya.<sup>62</sup> Ini menegaskan, tindakan *ihthikar* adalah suatu kejahatan, minimal merupakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena sangat merugikan, dan memberikan rasa kekecewaan kepada pembeli.

Hukum menjual beras tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam penguraiannya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *majmu` al-fatawa* membahasnya bersamaan dengan perkara *al-ihthikar*/penimbunan, kutipannya sebagai berikut:

الاحْتِكَارُ " لَمَّا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " { لَا يَحْتَكَرُ إِلَّا خَاطِئٌ }<sup>٦٣</sup> فَإِنَّ الْمُحْتَكَرَ هُوَ الَّذِي يَعْمَدُ إِلَى شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn `Amru al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IX (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 305. Hadis

مِنْ الطَّعَامِ فَيَحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَيُرِيدُ إِغْلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلْخَلْقِ  
 الْمُشْتَرِينَ وَلِهَذَا كَانَ لَوْلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَكْرَهُ النَّاسَ عَلَى بَيْعِ مَا عِنْدَهُمْ بِقِيَمَةِ  
 الْمَثَلِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِثْلَ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالنَّاسُ فِي  
 مَحْصَةٍ . فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِيَمَةِ الْمَثَلِ.<sup>64</sup>

Artinya: *Al-ihthikar*/penimbunan adalah ketika orang berhajat manusia kepada (barang yang ditimbun). Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam kitab shahihnya, dari Ma`mar ibn `Abdullah, bahwasanya Nabi saw bersabda: Tidaklah orang yang melakukan penimbunan barang tertentu, adalah ia seorang yang bersalaha. Karena sesungguhnya orang-orang yang menimbun barang itu adalah mereka yang dengan sengaja menyembunyikan suatu barang yang sangat berhajat manusia kepadanya, baik itu dalam bentuk makanan, maka diapun menyimpannya, berharap untuk menaikkan harga dengan harga yang tidak biasanya. Dia telah menjadi orang yang zhalim bagi hak-hak pembeli, oleh sebab itu, bagi *waliul amri*, untuk memaksa manusia tersebut untuk menjualnya kepada manusia, yang harganya disesuaikan dengan harga pasaran /*qimah al-mitsil*. Paksaan itu dilakukan ketika adanya situasi yang sangat mendesak untuk kepentingan orang banyak, sedangkan ia sebenarnya tidak mempunyai hajat untuk barang itu (kecuali untuk keuntungan semata), manusia lainnya sangat memerlukan walaupun seenggam. Keadaan seperti inilah, orang itu harus dipaksa menjual dagangannya itu dengan harga pasaran/ *mahar mitsil*.

---

ke-2.990. Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Juz V (Bairut: Dar al-Ma`rifah, t.th), h. 62. Hadis ke-1.188.

<sup>64</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa*, h. 75.

Ulasan Ibnu Taimiyah di atas juga terdapat dalam bukunya yang lain berjudul *al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*.<sup>65</sup>

Dijelaskan adanya pendapat ahli fikih tentang penentuan harga yang diterapkan bagi makanan itu, sebagai berikut:

ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام لغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره.<sup>66</sup>

Artinya: Dan dalam permasalahan tentang penentuan harga, ahli fikih berpendapat, siapa saja dalam kondisi darurat dalam kebutuhan terhadap makanan itu, yang tidak dapat diperolehnya kecuali dengan *qimah mitsl*/ harga pasaran, sedangkan penjual menolak untuk menjualnya, kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari makanan itu. Penimbun/ penjual itu ia tidak ada hak untuk harga yang tinggi, haknya adalah harga makanan itu dengan harga *qimah mitsl*/ harga pasaran.

Ibnu Taimiyah mengulas lebih panjang mengenai hal di atas, dengan menyandarkan pendapatnya dengan beberapa orang ulama yang berpendapat sama dengannya, sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Mesir: Al-Maktabah al-`Ilmiyah, t.th), h. 17.

<sup>66</sup> *Ibid.*

إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ سَعْرٌ غَالِبٌ فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَبِيعَ بِأَعْلَىٰ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ  
يَمْنَعُ مِنْهُ فِي السُّوقِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ . وَهَلْ يَمْنَعُ النُّقْصَانَ ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ  
لَهُمْ . وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَحْمَدَ : كَأَبِي حَفْصٍ الْعَكْبَرِيِّ . وَالْقَاضِي  
أَبِي يَعْلَىٰ ؛ وَالشَّرِيفُ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ وَأَبِي الْخَطَّابِ ؛ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمْ :  
فَمَنْعُوا مِنْ ذَلِكَ.<sup>٦٧</sup>

Artinya: Apabila telah didapati suatu ketentuan harga yang telah ditetapkan, maka ada yang menginginkan untuk menjual komoditinya dengan harga lebih tinggi dari yang telah ditentukan itu, maka menurut Imam Malik, ia dicegah untuk memasarkan dagangannya ke pasar. Mengenai pelanggaran itu, apakah ada ketentuan hukuman lainnya?. Terhadap masalah ini, baik Imam asy-Syafi'i, pendapat ulama Hanbali, seperti Abu Hafsh al-Akbari, dan Qadhi Abu Ya'la, dan Syarif Abu Ja'far, Abu al-Khaththab, Ibnu 'Aqil dan selain mereka berpendapat, melarang dari tindakan itu.

Ibnu Taimiyah menjelaskan, seandainya ada yang tidak sepakat mengenai ketentuan harga, itu tidak dipandang, dipandang adalah pendapat dari jumbuh ulama, ulasanya sebagai berikut:

قُلْتُ : وَعَلَىٰ قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي : الَّذِي يُؤْمَرُ مِنْ حَطِّ  
عَنْهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ هُوَ السَّعْرُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمْهُورُ النَّاسِ ؛ فَإِذَا انْفَرَدَ مِنْهُمْ

<sup>67</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, h. 90.

الوَاحِدِ وَالْعَدَدِ الْيَسِيرِ بِحِطِّ السَّعْرِ أَمْرًا بِاللَّحَاقِ بِسَعْرِ الْجُمْهُورِ ؛ لِأَنَّ  
الْمُرَاعِيَّ حَالَ الْجُمْهُورِ وَبِهِ تَقُومُ الْمَبِيعَاتُ.<sup>68</sup>

Artinya : Saya (Ibnu Taimiyah), mempunyai pandangan yang sama dengan Imam Malik. Abu al-Walid al-Baji berpendapat, yang dia memerintahkan orang-orang yang menjaga untuk membatasi harga komoditi yang telah disepakati oleh kebanyakan masyarakat. Jika didapati seorang saja, yang menurunkan harga dengan murah kurang dari harga yang telah ditentukan, maka pedagang itu diperintahkan untuk mengikuti harga yang telah ditentukan. Karena harga yang telah ditentukan, itulah yang harus diikuti oleh para penjual.

Penentuan harga bahan pokok tidaklah bersifat umum dalam pandangan Ibnu Taimiyah, karena penentuan ambang batas terhadap bahan pokok hanya dalam kondisi tertentu, dharurat, hidup orang banyak, dan kondisi terjadinya kecurangan, atau pun sikap dari penjual yang hanya mementingkan keuntungan belaka, seandainya kenaikan itu sifatnya lazim, tanpa terdapat kecurangan dan sebab yang telah disebutkan di atas, Ibnu Taimiyah melarang dalam penentuan harga komoditi bahan pokok. Tinggi dan rendahnya harga tersebut adalah bagian dari kewajaran, dan merupakan tabiat dari pasar, seandainya pasar tersebut berjalan dalam koridor dan nilai-nilai kemanusiaan yang baik.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 92.

Ulasan Ibnu Taimiyah tentang melarang penentuan harga bahan pokok

*sal`ah* dalam kondisi normal, penulis cantumkan di bawah ini:

والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالباً من  
الجلب و قد يباع فيها شيء يزرع فيها وإنما كان يزرع فيها  
الشعير فلم يكن البائعون ولا المشترون ناساً معينين ولم يكن  
هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليحبر على عمل  
أو على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد في  
سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا  
من يخرج في الغزو وكل منهم يعزو بنفسه و ماله أو بما يعطاه من  
الصدقات أو الفىء أو ما يجهزه به غيره وكان أكره البائعين  
على أن لا يبعوا سلعتهم إلا بثمن معين أكرهاً بغير حق. وإذا  
لم يكن يجوز أكرههم على أصل البيع فأكرههم على تقدير الثمن  
كذلك لا يجوز.<sup>69</sup>

Artinya : Makanan dijual di kota Madinah secara biasa, asalnya dari hasil daerah lain, meskipun begitu terdapat juga yang berasal dari hasil pertanian daerah itu sendiri. Hasil pertanian di Madinah adalah gandum, baik penjual maupun pembeli bukanlah orang yang sudah pasti. Begitupun belum ada seseorang yang sungguh-sungguh membutuhkan milik orang lain, sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dipaksa untuk melakukan pekerjaan atau menjual sesuatu. Semua umat Islam di kota itu sifatnya homogen. Berjuang di jalan Allah dan berjihad

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 36.

mempertaruhkan jiwa dan hartanya atau dengan apapun mereka miliki baik yang berasal dari sedekah, pajak, maupun dengan milik temannya yang disediakan secara sukarela. Realitas semacam itu, memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pokok tentulah merupakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. Memaksa mereka untuk mengikuti harga patokan adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.”

Menguatkan pendapat yang telah diterangkan oleh Ibnu Taimiyah di atas, penulis mencantumkan pendapat dari al-`Ashimi dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`* menjelaskan perbuatan *al-ihthikar*/menimbun, definisi kata *al-ihthikar*/menimbun, dan *yujbar `ala bai`ihi*/dipaksa untuk menjualnya, ulsannya di bawah ini:

أي ويحرم الاحتكار في قوت آدمي، نحو تمر، وبر، ونحوه، لخبر «لا يحتكر إلا خاطئ» والاحتكار: هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، والمحتكر هو الذي يتلقى القافلة، فيشتري الطعام منهم ويريد إغلاءه على الناس، وهو ظالم لعمومهم.<sup>70</sup>

Artinya: Diharamkan untuk melakukan penimbunan dalam urusan bahan makanan pokok manusia, semisal tamar, gandum, dan sebagainya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw: Tidaklah melakukan penimbunan di antara kamu, melainkan ia orang bersalah. Tindakan penimbunan itu adalah suatu hal berkaitan dengan urusan perdagangan, ia menahannya/ menyimpannya ketika orang-orang membutuhkannya. *Al-muhatakir*, adalah pelaku penyimpan

<sup>70</sup> `Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-`Ashimi al-Hanbali an-Najdi, *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Ma`arif, 1397 H), cet. 1, h. 390.



makanan. Ia akan memborong makanan, untuk menaikkan harga yang tidak lazim kepada manusia, dalam hal ini ia telah melakukan kezhaliman kepada orang banyak.

Tentang pemaksaan yang harus dilakukan itu, yakni:

أي يجبر المحتكر طعام الآدمي أن يبيع طعام الآدميين، كما يبيع الناس ،  
دفعاً للضرر.<sup>71</sup>

Artinya: Artinya, si penimbun itu dipaksa untuk menjual kepada masyarakat

barang dagangannya itu, seperti hal biasanya dalam jual beli, hal itu

dilakukan untuk menolak mudhurat/ kesulitan.

الاحتكار: هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، والمحتكر هو  
الذي يتلقى القافلة، فيشتري الطعام منهم ويريد إغلاءه على الناس، وهو  
ظالم لعمومهم.<sup>72</sup>

Artinya: *Al-ihthikar* ialah suatu tindakan dari penjual yang menahan/ menyimpan barang dagagannya, ketika masyarakat sangat membutuhkannya, sedangkan pelakunya disebut *al-muhtakir/* penimbun, di tangannya perbuatan untuk menyimpan komoditi yang dibutuhkan itu. Ia berharap, ketika menjual makanan itu, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Perbuatannya itu adalah penzhaliman kepada masyarakat secara umum.

Al-`Ashimi mengutip pendapat dari Ibnu al-Qayyim, sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

قال ابن القيم: فيمن يشتري الطعام يريد إغلاءه، هو ظالم لعموم الناس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم، بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه.<sup>73</sup>

Artinya: Berkata Ibnu al-Qayyim, siapa saja yang menjual makanan dengan menginginkan harga yang tidak wajar/ tinggi, maka dia adalah orang yang zhalim kepada manusia. Oleh sebab itu, pemerintah/ *wali al-amri* hendaknya memaksa orang yang melakukan penimbunan itu untuk segera menjual barang dagangannya yang ada, dengan harga yang pantas. Itu dilakukan karena hajat hidup orang banyak kepada barang tersebut.

## B. Analisis Penulis

Sesuai dengan yang diterangkan di atas, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pegangan penting dalam pembahasan ini, yakni: 1). Tindakan *ihthikar*/ menimbun adalah suatu hal yang dilarang oleh agama Islam, 2). Tindakan menimbun adalah suatu hal yang dapat memudhratkan orang banyak dan merupakan suatu tindakan penzhaliman kepada masyarakat, 3). Wajib bagi pemerintah/ pihak terkait untuk mengontrol dan kalau menemukan *muhtakir*/ penimbun, agar

---

<sup>73</sup> `Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-`Ashimi al-Hanbali an-Najdi, *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`*, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma`arif, 1397 H), cet. 1, h. 390. Lihat juga teks yang hampir sama dengan yang dicantumkan dalam tulisan Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`ad Syams ad-Din ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, Juz I (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 329.

memaksanya menjual barang dagangannya dengan harga yang layak dan pantas, 4). Kalau tidak patuh, pedagang tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan di pasar tersebut.

Kaitan ulasan di atas dengan yang terjadi di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, terdapat tidak adanya pengaturan yang tetap dilakukan oleh penjual, dan penetapan harga dilakukan oleh penjual itu sendiri. Sesuai dengan informasi yang didapatkan sewaktu observasi, harga yang dipatok oleh penjual di Pasar Sumbul bervariasi, tidak tetap, dan sangat menyulitkan pembeli/ masyarakat yang membutuhkan. Selisih harga bisa mencapai Rp. 5.000,-/ liternya hingga Rp. 6.000,-/ liternya. Kenaikan harga kerap terjadi sewaktu menjelang hari-hari besar, dan kerap tidak adanya penurunan harga yang signifikan setelah hari-hari besar tersebut.

Sebagian besar dari penjual dan pembeli tidak mengetahui adanya penetapan harga besar sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/ M-DAG/ PER/8/2017 mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) dari komoditi beras. Informasi yang didapatkan dari pihak kelurahan setempat, juga tidak mengetahui adanya ketetapan

harga beras tersebut, dan berpendapat bahwa seandainya ada ketetapan itu tentu pihak kelurahan akan mensosialisasikannya kepada masyarakat, terkhusus di Pasar Sumbul. Di tambah lagi, tidak adanya pengaduan atau protes yang diajukan oleh masyarakat kepada pihak kelurahan, permasalahan ini tidak kunjung bisa terselesaikan hingga saat ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Konsep penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah

Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah adalah kewajiban dari pemerintah/ *waliul amri*, karena pemerintahanlah yang bisa melakukan itu dengan kekuasaan dimilikinya. Penetapan harga menjadi wajib, apabila terjadinya tindakan kecurangan, seperti penimbunan/ *al-ihthikar* yang berdampak kepada tingginya harga di pasaran. Penentuan harga di pasaran tidak diberlakukan, apabila kenaikan harga terjadi dengan kondisi normal, dan bukan berdasarkan kecurangan.

##### 2. Penetapan Harga Beras Di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi

Sesuai dengan informasi yang didapatkan, hampir keseluruhan nara sumber tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. Penetapan harga beras Di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ditetapkan secara bebas oleh penjual, tidak ada kontrol dari pihak berwenang. Perbandingannya harga hingga Rp.

5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,-. Tiada standar khusus mengenai pemberlakuan harga beras.

### 3. Hukum Menjual Beras Tidak Sesuai Dengan Harga Penetapan Pemerintah Menurut Ibnu Taimiyah

Hukum menjual beras tidak sesuai dengan harga penetapan pemerintah menurut Ibnu Taimiyah haram hukumnya, karena sifatnya menzhalimi penjual, dan masyarakat secara umum. Wajib bagi pemerintah untuk menindaknya dengan melakukan penetapan harga yang menjadi acuan bagi penjual. Tindakan penimbunan yang dilakukan oleh *muhtakir*/ penimbun, wajib bagi pemerintah untuk menindaklanjutinya dengan memaksa orang tersebut menjual makanan pokok itu, dan dengan harga pasaran/ *qimah al-mitsl*.

## B. Saran-saran

1. Disarankan kepada penjual agar mengetahui terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras, sehingga menjadi acuan harga beras, dan tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan.

2. Kepada penjual dan masyarakat secara umum, agar melek terhadap informasi, dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak kelurahan, terhadap kegelisahan harga beras yang tinggi.
3. Kepada aparat kelurahan, agar memberikan informasi yang valid demi mencerdaskan masyarakat, dan juga memberikan himbauan kepada penjual. Agar terjalinnya keseimbangan antara penjual dan pembeli, dan lancarnya perputaran ekonomi di Pajak Sumbul Kecamatan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
4. Kepada Dinas dan Pemerintahan setempat agar memberikan info terbaru terkait dengan pasar, khususnya harga beras yang merupakan bahan primer dan pokok bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*.

Bandung: Pustaka Setia. 2013. Cet. 1.

Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`ad Syams ad-Din

ibn Qayyim. *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*. Juz I. Mesir: Dar al-Fikr. T.th.

Al-Jaziri, `Abdur Rahman. *Kitab al-Fiqh `ala mazahaib al-`Arba`ah; Qism al-*

*Mu`amalah*. Turki: Dar ad-Dakwah. 1986.

An-Najdi `Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-`Ashimi al-Hanbali.

*Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`*. Juz IV. Bairut: Dar

al-Ma`arif. 1397 H. Cet. 1.

As-Salman, Abu Muhammad `Abd al-`Aziz ibn Muhammad ibn `Abd ar-

Rahman ibn `Abd al-Muhsin. *Al-As'ilah wa al-Ajwabah al-Fiqhiyyah*.

Juz IV. Bairut: Dar al-Ma`arif. T.th.

As-Subki, Taj ad-Din `Abdul Wahhab ibn `Ali ibn `Abd al-Kafi. *Al-Asybah*

*wa an-Nazha'ir*. Juz I. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah. 1991.



As-Suyuthi, `Abdur Rahman ibn Abu Bakar. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Juz I.

Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah. 1403 H.

Asy-Syaibani, Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah. *Musnad Ahmad ibn*

*Hanbal*. Juz III. Kairo: Mu'assasah Qurthubah. T.th.

At-Turmuzi, Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhaha.

*Sunan at-Turmuzi*. Juz V. Bairut: Dar al-Ma`rifah. T.th.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi. *Statistik Daerah Kabupaten Dairi*

*2017*. Dairi: CV. Bima Masa. 2017.

Dawud, Abu Sulaiman ibn al-Asy`ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn

`Amru al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Juz IX. Bairut: Dar al-

Ma`rifah. 2008.

Jaib, Sa`di Abu. *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istihlahan*. Damsyiq:

Dar al-Fikr. 1998.

Majah, Ibn Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani. *Sunan ibn*

*Majah*. Juz VI. Bairut: Dar al-`Ilmiyah. T.th.

Najim, Zain al-`Abidin ibn Ibrahim ibn. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Juz I.

Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah. 1980.

Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan

Harga Eceran Tertinggi Beras.

Sabiq, As-Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-

Tsaqafah al-Islamiyah. T.th.

Sumber Data Profil Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul

Kabupaten Dairi.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*.

Bandung: Pustaka Setia. 2006. Cet. 3.

Taimiyah, Ibn Taqi ad-Din Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim al-

Harani al-Hanbali. *Majmu` al-Fatawa*. Juz XXVIII. Bairut: Dar al-

Wafa'. 2005. Cet. 3.

Taimiyah, Ibn. *Al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*.

Mesir: Al-Maktabah al-`Ilmiyah. T.th.

Tarigan, Azhari Akmal. *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis; Telaah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana. 2015. Cet. 2.

### **PERTANYAAN KEPADA PENJUAL**

1. Apa yang menjadi alasan Bapak/ Ibu berjualan di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi?
2. Sudah berapa lama Bapak/ Ibu berjualan di sini?
3. Apakah menyewa tempat jualan di sini relatif murah atau mahal?, dan bagaimana sistem pembayarannya?
4. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui pihak yang memiliki atau yang bertanggung jawab dengan tempat ini?
5. Apakah ada peraturan yang dibuat bagi penjual ketika berjualan di sini?
6. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya peraturan dari Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar?
7. Kalau tau, dari mana Bapak/ Ibu mengetahuinya?
8. Apa pendapat Bapak/ Ibu mengenai ambang batas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar?
9. Apakah Bapak/ Ibu mematuhi peraturan itu?
10. Berapa selisih harga besar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan harga besar yang Bapak/ Ibu tentukan?
11. Seandainya terjadi pengabaian, dan penjual tetap menentukan harga lebih tinggi dari ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar, sanksi apa yang diberikan?
12. Apakah Bapak/ Ibu merasa terganggu dengan adanya penetapan harga beras oleh Pemerintah Kabupaten Dairi ini?
13. Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terhadap pembeli, yang merasa keberatan dengan tingginya harga melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi?, dan pernahkah terjadi komplain dari pembeli?, serta apa yang Bapak/ Ibu lakukan?

14. Apakah Bapak/ Ibu tau, adanya larangan dalam Hukum jual beli Islam, berkaitan dengan menaikkan harga di luar batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
15. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu terhadap adanya hukum ketetapan harga oleh pemerintah dalam pandangan Hukum Islam itu?, apakah Bapak/ Ibu mau mentaatinya?, kalau tidak mengapa?

### **PERTANYAAN KEPADA PEMBELI**

1. Apa yang menjadi alasan Bapak/ Ibu membeli di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi?
2. Sudah berapa lama Bapak/ Ibu menjadi konsumen di pasar ini?
3. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui pihak yang memiliki atau yang bertanggung jawab dengan tempat ini?
4. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya peraturan dari Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar?
5. Kalau tau, dari mana Bapak/ Ibu mengetahuinya?
6. Apa pendapat Bapak/ Ibu mengenai ambang batas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar?
7. Berapa selisih harga besar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan harga besar yang Bapak/ Ibu beli di pasar ini?
8. Seandainya terjadi pengabaian, dan penjual tetap menentukan harga lebih tinggi dari ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar, apa yang Bapak/ Ibu lakukan?, tetap membeli atau mencari di tempat lain?
9. Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terhadap penjual yang mematok harga lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi?, dan apakah Bapak/ Ibu pernahkah komplain dari penjual?, serta apa yang Bapak/ Ibu lakukan?

### **PERTANYAAN KEPADA LURAH**

1. Sudah berapa lama Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ada?
2. Bagaimana penentuan sewa tempat penjual di pasar ini?, dan bagaimana sistem pembayarannya?
3. Apakah ada peraturan yang dibuat bagi penjual ketika berjualan di sini?
4. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya peraturan dari Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar?
5. Kalau tau, dari mana Bapak/ Ibu mengetahuinya?
6. Apa pendapat Bapak/ Ibu mengenai ambang batas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar?
7. Seandainya terjadi pengabaian, dan penjual tetap menentukan harga lebih tinggi dari ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan penetapan harga besar, sebagai aparatur desa, sanksi apa yang diberikan?
8. Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terhadap penjual, yang merasa keberatan dengan ambang batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi?, dan pernahkah terjadi komplain dari penjual terhadap penerapan peraturan itu?, serta apa yang Bapak/ Ibu lakukan?

**PHOTO NARA SUMBER**

**BAPAK BURHAN SAGALA**  
(Lurah di Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi)





**IBU ERNAWATI LINGGA, IBU HIKMAH PASARIBU  
DAN IBU RIKA SAUT**  
(Pembeli di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan  
Sumbul Kabupaten Dairi)



**BAPAK HENDRI GIRSAK**

(Penjual di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan  
Sumbul Kabupaten Dairi)



**BAPAK ROBI LINGGA**  
(Penjual di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan  
Sumbul Kabupaten Dairi)



**IBU DOMINA BR. MONJORANG**  
(Penjual di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan  
Sumbul Kabupaten Dairi)



**IBU FITRI MUNTHE**  
(Penjual di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan  
Sumbul Kabupaten Dairi)

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ganda Hidayah Simbolon, yang lahir di Sumbul Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, pada tanggal 15 Maret 1996. Ayahanda penulis bernama Tawafi Simbolon, sedangkan ibunda penulis Riama Br. Sinaga (almh). Penulis adalah anak ke-2, dari 6 bersaudara.

1. SD Negeri 030334 Sumbul Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, dari tahun 2003 s/d 2008.
2. SMP Negeri 1 Sumbul Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, dari tahun 2009 s/d 2011.
3. MAS Pesantren Dairi, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, dari tahun 2012 s/d 2014.
4. Kemudian melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi negeri UIN-SU Medan Program Studi Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah, Fakultas Syari`ah dari tahun 2014 s/d 2019.

**FHOTO PROFIL KELURAHAN PEGAGAN JULU I KECAMATAN SUMBUL  
KABUPATEN DAIRI**



**ORGANISATORIS KELURAHAN DAN PETA**  
(Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi)







BATAS WILAYAH :	
SEBELAH UTARA	: DESA PEG. JULU. III & VI
SEBELAH TIMUR	: DESA PEG. JULU. II & T.J. BERKININ
SEBELAH SELATAN	: DESA PEG. JULU. II & IV
SEBELAH BARAT	: KEC. SITINJO
LUAS WILAYAH :	
LUAS WILAYAH	= 378 Ha
TINGGI DIATAS PERMUKAAN LAUT	= 1000-2100M
CURAH HUJAN RATA <sup>2</sup> / THN	= 2000-3000M
SUHU RATA <sup>2</sup>	= 20 <sup>0</sup> / <sub>2</sub> 23 <sup>0</sup>
SAWAH	= 166 Ha
LADANG TEGALAN	= 120 Ha
PEMUKIMAN	= 68 Ha
LAPANGAN SEPAK BOLA	= 1 Ha
PEKAN	= 5 Ha
KUBURAN	= 2 Ha
LAIN - LAIN / PERHAANTORAN	= 8 Ha
JALAN <sup>2</sup> PROPINSI	= 2,1 Km
JALAN KABUPATEN	= 8,1 Km
JALAN BATU	= 2,5 Km
JALAN TANAH	= 5 Km
KETENDUKAN :	
JUMLAH PENDUDUK	= 6.577 jiwa
LAKI - LAKI	= 3.298 jiwa
PEREMPUAN	= 3.279 jiwa
KEPALA KELUARGA.	= 1.483 KK

ULU.1		BIN: Des 2014	
PEREKONOMIAN & JASA			
KUD	1 UNIT	KEL. TANI	= 45 KEL
KSU	- UNIT	P3A	= 2 KEL
KOPPAS	- UNIT	PRODUKSI PERT. & TERNAK	
KPN	1 UNIT	PADI SAWAH	= 4,5 TON/ha
GU	6 UNIT	JAGUNG	= 6,0 TON/ha
PEKAN	1 UNIT	KUBIS	= 0,5 TON/ha
BANK	3 UNIT	KENTANG	= 0,5 TON/ha
KEDAI KOPI	20 UNIT	SAWI	= 0,7 TON/ha
KEDAI NASI	14 UNIT	TERONG	= 0,3 TON/ha
KELONTONG	21 UNIT	BUNCIS	= 0,5 TON/ha
TOKO BANGUNAN	5 UNIT	TOMAT	= 12 TON/ha
TOKO PERTAMIAN	10 UNIT	CABE	= 10 TON/ha
WARTEL / KIOS PROM	4 UNIT	UBI JALAR	= 0,5 TON/ha
BENGKEL RODA. 2.	14 UNIT	UBI KAYU	= 1,5 TON/ha
BENGKEL RODA. 4.	6 UNIT	KOPI ROBUSTA	= 1 TON/ha
HOTEL / PENGINAPAN	2 UNIT	KOPI ARABICA	= 30 TON/ha
KILANG PADI	3 UNIT	AYAM	= 220 EKOR
GEDUNG SERBA GUNA	3 UNIT	ITIK	= 120 EKOR
TK. JAHIT	10 UNIT	KAMBING	= - EKOR
TK. PANGKAS	4 UNIT	KERBAU	= 80 EKOR
SALON	7 UNIT	BABI	= 500 EKOR
FOTO COPY	4 UNIT	KESADARAN MASYARAKAT :	
TOKO PERABOT	7 UNIT	JUMLAH WP. PBB	= 2067
TK. MAS	7 UNIT	REALISASI PENERIMAAN PBB	= Rp. 222.708
PEMILIK TELEPON	RT	SWADAYA G. RDTONG. MASY	= Rp. 100.000.00
PELANGGAN PDAM	: 605 RT	SWADAYA MURNI MASY	= Rp. 2.000.00
PELANGGAN PLN	: 1346 RT	TARGET PBB	= Rp. 4.000.00
REKANAN	: 8 UNIT		

<b>DATA PROFIL KELURAHAN</b>		
<b>JLH. PENDUDUK MENURUT AGAMA</b>		
- ISLAM	=	460 JIWA
- PROTESTAN	=	5.555 JIWA
- KATHOLIK	=	382 JIWA
<b>JLH. PENDUDUK MENURUT SUKU</b>		
- PAK PAK	=	1.572 JIWA
- T O B A	=	3.173 JIWA
- SIMALUNGUN	=	1.356 JIWA
- K A R O	=	290 JIWA
- JAWA - PADANG - TAPSEL - NIAS	=	192 JIWA
<b>JLH. PEND. MENURUT PEMERUSAHAAN</b>		
- PETANI	=	2.125 JIWA
- P N S	=	230 JIWA
- TNI / POLRI	=	37 JIWA
- PENSIUNAN	=	225 JIWA
- PEDAGANG / PENGUSAHA	=	680 JIWA
- BURUH	=	- JIWA
- LAIN - LAIN / PELAJAR / MAHASISWA	=	3.080 JIWA
<b>JLH. PENDUDUK M. TK. KESEKUTERAAN :</b>		
- PRA SEJAHTERA	=	244 K K
- KLS . I	=	485 K K
- KLS . II	=	429 K K
- KLS . III	=	315 K K
- KLS . III PLIJS	=	10 K K
<b>PERUBAHAN PENDUDUK :</b>		
L A H I R	=	27 ORG
M A T I	=	19 ORG
P I N D A H	=	110 ORG
D A T A N G	=	29 ORG